

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKjIP

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON

TAHUN 2024





## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan anugerah sehingga penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kab. Lampung Barat tahun 2023 dapat diselesaikan dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan Kegiatan yang Mengacu Pada Rencana Strategis pada tahun 2023-2026. Laporan Kinerja merupakan hasil capaian kinerja secara ringkas dan lengkap berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon dalam rangka pelaksanaan APBD tahun 2024. Laporan Kinerja disusun dalam bentuk Laporan dengan pendekatan pengukuran kinerja, dimana capaian indikator diukur dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 4 Analisis ini untuk memudahkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon fokus pada upaya peningkatan kinerja.

Demikian laporan ini disusun, Kami berharap dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka perumusan kebijakan yang lebih terarah dan terpadu dalam usaha kinerja dimasa yang akan datang.

Liwa, Januari 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN PEKON

BULKI,S.Pd

Pembina Utama Muda  
NIP. 19690915 199408 1 001



## DAFTAR ISI

<b>COVER</b>	
<b>LATAR BELAKANG</b>	
<b>DAFTAR ISI</b>	
<b>DAFTAR TABEL</b>	
<b>DAFTAR DIAGRAM</b>	
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.A Latar Belakang .....	4
1.B Tugas dan Fungsi.....	5
1.C Struktur Organisasi.....	6
1.D Peran Strategis Perangkat Daerah .....	7
1.E Isu Strategis .....	10
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
II.A Strategi Arah Kebijakan .....	9
II.B Program dan Kegiatan.....	11
II.C Perjanjian Kiinerja Tahun 2024 dan Kerangka Pendanaan.....	11
II.D Target Kinerja Menurut Renstra.....	13
<b>BAB III KAPASITAS ORGANISASI</b>	
III.A Analisis Sumber Daya Manusia .....	19
III.B Analisis Sarana dan Prasarana.....	22
III.C Analisis Dokumen pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 .....	22
<b>BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
III.A Capaian Kinerja .....	22
III.B Perbandingan Kinerja .....	25
III.C Realisasi Anggaran .....	37
III.D Pemanfaatan Laporan Kinerja .....	48
<b>BAB V PENUTUP</b>	
IV.A Simpulan Umum .....	53
IV.B faktor pendukung Keberhasilan.....	55
IV.C Permasalahan.....	47
IV.4 Rekomendasi dan Tindak lanjut.....	56
<b>Lampiran</b>	
- Rencana Aksi	
- Pk 2024 dan perubahannya	
- Foto Kegiatan tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	
- Sumber Data	



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Tujuan RPD **Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Inovatif dan Transparan** dan sasaran Strategis RPD **Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan** dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Barat, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan Tujuan **Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Inovatif dan Transparan** dan sasaran Strategis **Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan**, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran RPD yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas





Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Kabupaten Lampung Barat diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, Tujuan RPD **Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Inovatif dan Transparan** dan sasaran Strategis RPD **Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan** realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023, tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat mempunyai tugas dan kewajiban :

Dinas Pemberdayaan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan Kepala Daerah..

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan dilingkungan dinas yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. perumusan kebijakan teknis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pemberdayaan masyarakat dan pekon;
- c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan pekon;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat dan pekon;
- e. melaksanakan penyusunan kebijakan pedoman dan petunjuk teknis dinas;
- f. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pembangunan kawasan potensial dan terisolir serta penanggulangan kemiskinan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- h. pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;



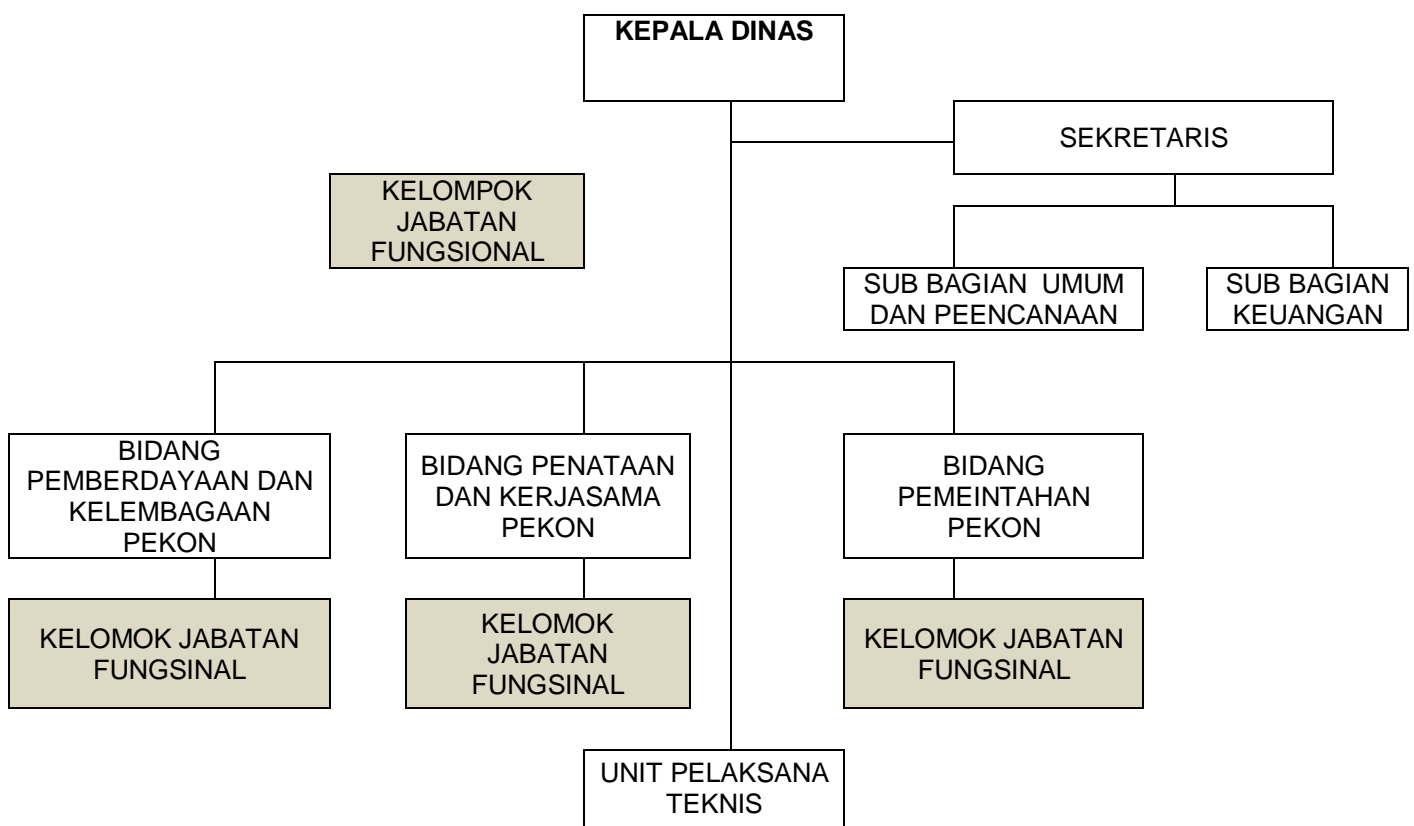
### C. Struktur Organisasi Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Pekon

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Lamung Barat Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Kepegawain
  - b. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Penataan dan Kerjasama Pekon terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Pemerintahan Pekon terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban pada tahun 2024 Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Pekont dipimpin oleh BULKI, S.Pd.,MM yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat structural dan fungsional sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon





#### **D. Peran Strategis Perangkat Daerah**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang di fokuskan pada kegiatan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan dalam aspek pengembangan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan melalui penguatan kapasitas lembaga masyarakat dan pengembangan pola pembangunan partisipatif, pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat, pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup. Pemerintah bersama masyarakat secara berkelanjutan mengembangkan berbagai program dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat dalam mengembangkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelayanan kesehatan

Pemerintah bersama masyarakat secara berkelanjutan mengembangkan berbagai program dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat dalam mengembangkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelayanan kesehatan.

Sejalan dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, maka pemerintah daerah memiliki keleluasaan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, termasuk penetapan kebijakan dan program – program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

#### **E. Isu Strategis**

Isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon adalah sebagai berikut :

1. Lemahnya kapasitas masyarakat desa/kelurahan terhadap pemanfaatan potensi sumber daya dalam pengembangan usaha ekonomi produktif.
2. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintahan pekon.
3. Belum optimalnya partisipasi masyarakat desa/kelurahan dalam mendukung pembangunan diperdesaan
4. Belum optimalnya fungsi kelembagaan dan sistem informasi masyarakat baik sosial maupun ekonomi dalam menunjang pemberdayaan masyarakat
5. Masih rendahnya peran perempuan pada setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi hasil-hasil pembangunan
6. Rendahnya kualitas sumberdaya aparatur pemerintah pekon
7. Masih kurangnya tingkat pemahaman SDM dalam pengembangan ekonomi berbasis kerakyatan
8. Pemberdayaan masyarakat berbasis gender



9. Belum berkembangnya pengetahuan dan keterampilan di bidang teknologi tepat guna( TTG)
10. Diberlakukanya undang -undang no 6 tahun 2014 tentang desa dimana desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.
11. Belum optimalnya pelaksanaan dan pemanfaatan dana desa



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Kabupaten Lampung Barat adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Tujuan RPD **Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Inovatif dan Transparan** dan sasaran Strategis **Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan** Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Kabupaten Lampung Barat. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Kabupaten Lampung Barat yang ditetapkan untuk jangka waktu 4 ( Empat ) tahun yaitu dari tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 .Penetapan jangka waktu 4 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Pj Bupati Lampung Barat terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Kabupaten Lampung Barat dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Kabupaten Lampung Barat tersebut ditujukan untuk mewujudkan Tujuan RPD **Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Inovatif dan Transparan** dan sasaran Strategis **Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan** daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 - 2026. Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Kabupaten Lampung Barat telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 - 2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Kabupaten Lampung Barat merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Kabupaten Lampung Barat dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Kabupaten Lampung Barat tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Kabupaten Lampung Barat yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Kabupaten Lampung Barat dimuat program





dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Strategi Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Pemberdayaan dan Pekon Kabupaten Lampung Barat mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan pembangunan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 - 2026

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rangkaian strategi dan arah kebijakan disusun dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Dinas Pemberdayaan dan Pekon Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 - 2026

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya selanjutnya dijabarkan secara sistematis melalui perumusan strategi, arah kebijakan dan program pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1 Tujuan dan sasaran RPD

<b>Tujuan RPD : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Inovatif dan Transparan</b>			
<b>Sasaran RPD : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya Kualitas pemerintah Desa	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan dan Tata Kelola Pemerintah Pekon Secara Partisipatif	Mengoptimalkan fungsi lembaga kemasyarakatan pekon dalam menggerakkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dalam proses pembangunan	1.Mendorong kemandirian masyarakat pekon 2.Meningkatkan usaha ekonomi produktif masyarakat dan keluarga 3.Mendorong pemasyarakatan dan pendayagunaan teknologi tepat guna (TTG) bagi masyarakat dalam pengelolaan potensi sumber daya alam (SDA) yang berwawasan lingkungan

Sumber : Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon

## B. Program dan Kegiatan

Rencana program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 - 2026 merupakan penjabaran dari RPD Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri dari program yang menunjang secara langsung pencapaian program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai tugas dan fungsi di bidang pangan. Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon pada satu urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu:

Tabel 2.2 Program dan Kegiatan

KODE REKENING	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUAPTEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah
2.13.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.13.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang disusun
2.13.01.2.02.08	Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
2.13.01.05	Kegiatan Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah
2.13.01.02.05.09	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
2.13.01.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumah Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.13.01.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Organisasi yang disediakan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah



2.13.01.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Organisasi Pemeliharaan Barang Milik
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang memenuhi syarat penataan desa yang ditata
2.13.02.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Sub Organisasi Penyelenggaraan Penataan Desa
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Peningkatan Kerja Sama antar pekon utk meningkatkan ekonomi masarakat
2.13.03.2.01	Kegiatan Fasilitasi Kerja sama Antar Desa	Jumlah Fasilitasi Kerja sama Antar Desa
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase pekon Tertib Administrasi
2.13.04.2.01	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan Pembangunan Desa
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Kelembagaan Kemasyarakatan Pekon Aktif
2.13.05.2.01	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Lembaga yang mendapat Peningkatan kapasitas Kelembagaan

Sumber : Program/ Kegiatan DPA 2024 Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon



Indikator Kinerja Utama

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat

Tabel.2.2 Indikator Kinerja Utam

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Penjelasan Fomulasi/Rumus Perhitungan	TARGET				DEFINISI OPRASONAL	
					Sumber Data	2023	2024	2025		2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
.	Meningkatnya pemberdayaan Masyarkat dalam Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan ecara partisipaif	Prosentase Desa Mandiri	%	Jumlah Desa dengan Status mandiri / Jumlah Desa di Kabupaten Lampung Barat x 100	<i>Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi</i>	37,40%	39,69 %	41,22%	42,75%	<p>Desa Mandiri desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik.Aspek</p> <p>Aspek Perhitungan Desa Mandiri adalah meliputi aspek Ketahanan Sosial, Ekonimi dan Ekologi (Lingkungan)</p> <p>Manfaat ditetapkan Desa Mandiri :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Mengukur</b> kemajuan dan keberdayaanDesa</li> <li>2. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa</li> <li>3. Menciptakan lapangan kerja di sektor-sektor ekonomi lokal.</li> <li>4.Memperkuat budaya dan tradisi lokal. Meningkatkan pelayanan publik dan infrastruktur desa.</li> <li>6.acuan untuk perencanaan pembangunan Desa</li> </ol>



**B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

Sesuai dengan tujuan dan sasaran RPD yang diperjanjikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon melalui program dan kegiatan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Hasil Reviu Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	IKU / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Pekon Secara Partisipatif	Persentase Desa Mandiri	%	39,69%

Sumber data : Perjanjian Kinerja 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon

Program dan kegiatan pembangunan Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 - 2026 merupakan program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Lampung Barat yang merupakan Program Prioritas Kabupaten mendukung pencapaian sasaran RPD, Rincian Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyaakat dan Pekon adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 Rincian pendanaan Dinas Ketahanan Pangan tahun 2024

Kode	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Pagu Usulan	Pagu Murni	Pagu Pergeseran	Pagu Perubahan
02.09.01.	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</b>	3.585.654.400	<b>2.573.120.630</b>	<b>2.573.120.630</b>	2.922.662.630
02.09.01.2.01.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.503.600	33.664.000,	33.664.000,	33.664.000,
02.09.01.2.02.	Kegiatan Administrasi Keuangan	2.735.107.100	2.206.753.400	2.206.753.400	2.516.035.400
02.09.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11.500.000	0	0	0
02.09.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	377.766.300,	147.949.400	147.949.400	188.209.400,
02.09.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	159.425.400,	121.822.580,	121.822.580,	121.822.580,
02.09.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	256.352.000,	62.931.250	62.931.250	62.931.250
2 13 02	<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>	1.878.060.300	1.101.766.600	1.101.766.600	1.101.766.600
2 13 02 2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	1.878.060.300	1.101.766.600	1.101.766.600	1.101.766.600





2 13 03	<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA</b>	104.009.000,	39.459.300	39.459.300	39.459.300
2 13 03 2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	104.009.000,	39.459.300	39.459.300	39.459.300
2 13 04	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	1.567.595.500	408.612.100	408.612.100	713.241.100,
2 13 04 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.567.595.500	408.612.100	408.612.100	713.241.100,
2 13 05	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	1.479.185.600	638.931.900	638.931.900	744.379.900
2 13 05 2.01	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.479.185.600	638.931.900	638.931.900	744.379.900
	<b>TOTAL</b>	<b>8.614.504.800</b>	<b>4.761.890.530</b>	<b>4.761.890.530</b>	<b>5.521.509.530,</b>

Sumber data Renja, DPA dan DPA Perubahan 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon

**C.Target Kinerja Tahun 2024**

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) telah disusun dalam satu dokumen tersendiri dalam bentuk Rencana Kerja Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Pekon tahun 2024 Dalam RKT tersebut telah disusun sasaran dan Target Kinerja OPD tahun 2024 beserta indikator kerjanya. Dapat dilihat dalam tabel :

Tabel. 2.5 Sasaran Program dan kegiatan Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Pekon yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Prgram/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Out Put)	Target Kinerja Program dan Anggaran Tahun 2024	
				Target	Rp.
				Meningkatnya Kualitas pemerintahan Desa	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan dan Tata
		Persentase Desa mandiri	39,69%	<b>5.521.509.530</b>	



	Kelola Pemerintah Pekon Secara Partisipatif	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP	81,5 Poin	2.922.662.630
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	25 Dokumen	33.664.000,
		Kegiatan Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	4 Laporan	2.516.035.400
		Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	0
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket penyediaan administrasi umum	6 Sub Organisasi	188.209.400,
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Sub Organisasi	121.822.580,
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	22 unit	114.035.000
		PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang memenuhi syarat penataan desa yang ditata	100%	62.931.250
		Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa	131 Pekon	1.101.766.600
		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Peningkatan Kerja Sama antar pekon utk meningkatkan ekonomi masyarakat	2,29 %	1.101.766.600
		Kegiatan Fasilitasi Kerja sama Antar Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerja sama Antar Desa	1 Dokumen	39.459.300
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase pekon Tertib Administrasi	100 %	39.459.300
		Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan Pembangunan Desa	393 dokumen	713.241.100,
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA	Persentase Kelembagaan Kemasyarakata	100 %	713.241.100,



		KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	n Pekon Aktif		
		Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota	jumlah Lembaga yang mendapat Peningkatan kapasitas Kelembagaan	4 Lembaga	744.379.900

Sumber Data : RKT tahun 2023 Dinas Pmberdayaan Masyarakat dan Pekon

#### D.Pengukuran Kinerja

Untuk mengukur sejauh mana tercapainya target kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2024 dan Penetapan Kinerja Tahun 4 maka pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif maupun kuantitatif berdasarkan data yang relevan dengan setiap indikator kinerja sasaran. Pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas dan terukur merupakan media untuk mengetahui keberhasilan/kegagalan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyaraat dan Pekon Tahun 2024.

Persentase capaian kinerja dilakukan dengan membagi realisasi kinerja dengan target dengan rumus sebagai berikut ;

$$\text{Capaian indikator kinerja} = (\text{Realisasi} / \text{Rencana}) \times 100\%$$



### BAB III KAPASITAS ORGANISASI

#### A. Analisis Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia menjadi unsur penting dalam organisasi. Sebagai pemeran utama dalam menjalankan tugas pokok organisasi dan roda organisasi. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat melibatkan sumber daya manusia yang ada, dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda satu dengan lainnya, namun demikian diharapkan tetap dapat menjalankan tugas dan fungsi masing-masing guna mensinergikan tujuan yang hendak dicapai. Kondisi Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel data pegawai berikut :

Tabel 3.1 Data Pegawai Lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon

No	Unita Kerja	Jumlah Pegawai	
		PNS	THLS
1.	Kepala Dinas	1	-
2.	Sekretariat	6	7
3.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Pekon	7	3
4.	Bidang Penataan dan Kerja Sama Pekon	5	4
5.	Bidang Pemerintahan Pekon	7	3
<b>Jumlah Aparatur</b>		<b>26</b>	<b>17</b>

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Perencanaan.

Dari Tabel 1 dapat terlihat bahwa Jumlah Aparatur Struktural PNS di Lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon sebanyak 43 Orang yang terdiri dari 26 orang Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan 17 orang Tenaga Honor Lepas Harian (THLS).

Tabel 3.2 Data Pegawai Lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon menurut Golongan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah Pegawai
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
2.	Pembina Tingkat I (IV/b)	1
3.	Pembina (IV/a)	3
4.	Penata Tingkat I (III/d)	6
5.	Penata (III/c)	4
6.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	1
7.	Penata Muda (III/a)	8



8.	Pengatur Tingkat I (II/d)	0
9.	Pengatur (II/c)	2
<b>Jumlah Aparatur</b>		<b>26 Orang</b>

Sumber : Sub Bagian Umum dan Perencanaan.

Tabel 3.3  
Data Pegawai Lingkup  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon menurut Latar Belakang Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Pegawai
1.	Pasca Sarjana (S2)	5
2.	Sarjana (S1)	19
3.	Diploma III (D3)	2
4.	SLTA	0
<b>Jumlah Aparatur</b>		<b>26 Orang</b>

Sumber : Sub Bagian Umum dan Perencanaan.

Tabel 3.4  
Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional di Lingkup Dinas Pemberdayaan  
Masyarakat dan Pekon

No	Jabatan Struktural	Jumlah
1.	Eselon II.c	1
2.	Eselon III.a	1
3.	Eselon III.b	3
4.	Eselon IV.a	2
5.	Jabatan Fungsional	6
<b>Jumlah Aparatur</b>		<b>13 Orang</b>

Sumber : Sub Bagian Umum dan Perencanaan.

Tabel 3.5.  
Jumlah Pejabat yang telah Mengikuti Diklat PIM di Lingkup  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon

No	Jabatan	Jumlah
1.	Diklat PIM II	1
2.	Diklat PIM III	1
3.	Diklat PIM IV	6
<b>Jumlah Aparatur</b>		<b>8 Orang</b>

Sumber : Sub Bagian Umum dan Perencanaan





## B. Analisis Sarana dan Prasarana

Sarana yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat dalam menunjang kegiatannya adalah :

1. Mini Bus Roda Empat : 2 Unit
2. Sepeda Motor : 6 Unit

Prasarana yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat dalam menunjang kegiatannya adalah :

1. Gedung : 1 Unit
2. Komputer : 6 Buah
2. Laptop : 10 Buah
3. Filling Kabinet : 11 Buah
4. Lemari : 8 Buah
5. Meja : 34 Buah
6. Kursi : 44 Buah
7. Printer : 1 Buah

## C. Analisis Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2024

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2024 dilaksanakan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan sebanyak 5 program 9 kegiatan dan 41 Sub Kegiatan Alokasi dana Tahun 2024 dengan pagu sebesar Rp. **4.475.890.530,-** yang terdiri dari Belanja Pegawai Rp. 2.209.563.400,- Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.411.327.130,- Belanja Hibah Rp.125.000.000,- Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp.16.000.000,-

Terdapat penambahan anggaran untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon tahun 2024 sebesar Rp. **695.471.386,-** sehingga total anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp. **5.521.509.530,-** (2.529.288.786,- Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.787.073.130,- Belanja Hibah Rp.125.000.000,- Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp.16.000.000,-)

Penambahan anggaran ini terdapat pada Sub.kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan sebesar Rp. 319.725.386,- dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi sebesar Rp. 20.005.000 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rp. 250.243.000,- dan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 105.448.000,-



**BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pemberdayaan Masarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2023-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masarakat dan Pekon Tahun 2024, dan Indikator Kinerja Utama Pemberdayaan Masarakat dan Pekon telah ditetapkan sebanyak 1 sasaran dan sebanyak 1 indikator kinerja (out comes) dengan sasaran 1 terdiri dari 1 indikator

**A. Capaian Kinerja**

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan Masarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase Desa Mandiri	%	39.69%	48,09%	121%



Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 121% ditunjukkan pada indikator Persentase Pekon Desa Mandiri, dengan capaian kinerja tersebut, Secara umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2023-2026.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2024 dan membandingkan dengan capaian tahun sebelumnya (tahun 2023) dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.2 Hasil pengukuran capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon tahun 2024 dan perbandingan dengan tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja tujuan/sasaran	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian % Tahun 2023
				Target	Realisasi	
Meningkatnya Kualitas pemerintah Desa	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan dan Tata Kelola Pemerintah Pekon Secara Partisipatif	Persentase Desa mandiri	38,93%	39,69%	48,09%	121%

Sumber data : Surat Keputusan Menteri Desa, PD TT Nomor 400 Tahun 2023 tentang Status kemajuan dan kemandirian Desa tahun 2024

Desa Mandiri desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik

bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.



Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi (lingkungan). Dasar hukum pelaksanaannya Surat Keputusan Menteri Desa, PDTT Nomor 400 Tahun 2024 tentang Status kemajuan dan kemandirian Desa tahun 2024

**Komponen yang dianalisis dalam pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM)** antara lain:

**a) Indeks Ketahanan Sosial, meliputi aspek:**

- 1) Pendidikan
- 2) Kesehatan
- 3) Modal Sosial
- 4) Permukiman

**b) Indeks Ketahanan Ekonomi, meliputi aspek:**

- 1) Keragaman Produksi Masyarakat
- 2) Akses Pusat Perdagangan dan Pasar
- 3) Akses Logistik
- 4) Akses Perbankan dan Kredit
- 5) Keterbukaan Wilayah

**c) Indeks Ketahanan Ekologi (lingkungan) , meliputi aspek:**

- 1) Kualitas Lingkungan
- 2) Tangguh Bencana Alam
- 3) Tanggap Bencana

**Rumus Perhitungan IDM/ Metode Pengukuran**

$$IDM = \frac{IKS+IKE+IKL}{3}$$

Penentuan Status Indeks Desa Membangun (IDM )

Klasifikasi Status Desa ditetapkan dengan *ambang batas* sebagai berikut:

1. Desa Sangat Tertinggal :  $IDM \leq 0,4907$
2. Desa Tertinggal :  $0,4907 < IDM \leq 0,5989$
3. Desa Berkembang :  $0,5989 < IDM \leq 0,7072$
4. Desa Maju :  $0,7072 < IDM \leq 0,8155$
5. Desa Mandiri :  $IDM > 0,8155$



Analisis Terkait Pencapaian Sasaran Tahun 2024 : Meningkatnya Pemeberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Pekon Secara Partisipatif.

Persentase Desa Status Mandiri

$$= \frac{\text{Jumlah Desa Mandiri}}{\text{Jumlah Seluruh Desa}} \times 100\%$$

$$= \frac{63}{131} \times 100\%$$

$$= 48,09\%$$

Hasil perhitungan Indeks Desa Membangun ( IDM ) lampung Barat 2024

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Desa, PDTT Nomor 400 Tahun 2024 tentang Status kemajuan dan kemandirian Desa tahun 2024 data Desa Mandiri adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Perkembangan status Pekon Berdasarkan Indeks Desa Membangun

PERKEMBANGAN STATUS PEKON										
BERDASARKAN INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM)										
NO	STATUS PEKON	TAHUN								
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	MANDIRI	0	0	0	2	10	40	47	51	63
2	MAJU	1	2	2	30	44	61	63	64	57
3	BERKEMBANG	32	57	59	85	76	30	21	16	11
4	TERTINGGAL	72	62	61	14	1	0	0	0	0
5	SANGAT TERTINGGAL	26	10	9	0	0	0	0	0	0
TOTAL		131	131	131	131	131	131	131	131	131

Pada Tahun 2024, terdapat peningkatan status pekon sebagai berikut

a. Terdapat **5 Desa Berkembang** Tahun 2023 yang Berubah Status menjadi **Maju** di tahun 2024"

b. Tahun 2024 penambahan sebanyak **12 Desa** dengan status "Mandiri" baru

Dapat disimpulkan pencapaian pekon Mandiri tahun 2024 sebanyak **63 pekon** dari target 52 pekon dengan pencapaian **104,08%** dari 131 Pekon di kabupaten lampung Barat





**B. Perbandingan Kinerja**

**1. 1. Perbandingan Kinerja Tahun 2022, 2023 Dengan Tahun 2024**

Tabel 4.4 Capaian Kinerja 2022, 2023, 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun					
		2022		2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Desa mandiri	%	11,45	35,88%	37,40%	38,93%	39,69%	48,09%

Dari tabel di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :Persentase Desa mandiri pada tahun 2024 sebesar 48,09% dari tahun sebelumnya tahun 2023 yaitu 38,93%, mengalami **kenaikan sebesar 9,1 %**

Grafik 4.1 Capaian Kinerja 2022, 2023, 2024

Berdasarkan Tabel 4.2 terlihat bahwa indikator kinerja Pekon dengan status mandiri telah melampaui pada tahun 2024 telah melampaui Target yang ditetapkan, dan perlu dilakukan **penyesuaian Target Indikator tersebut**.

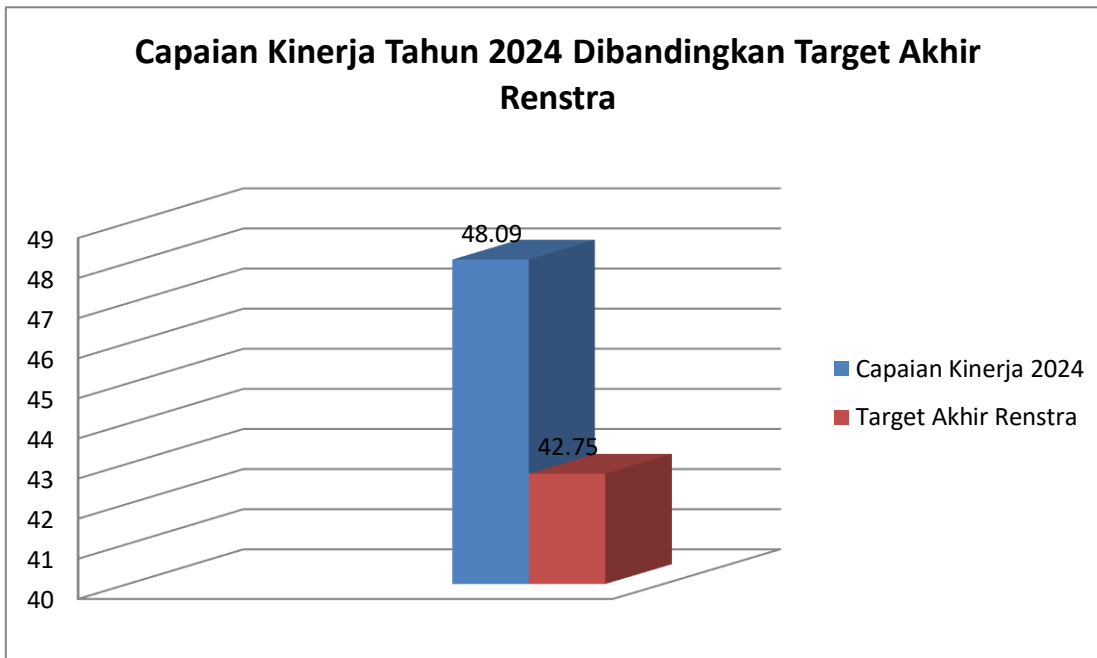
**2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan dengan Target Akhir Renstra**

Tabel 4.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan dengan Target Akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		%	Tahun 2026
			Target	Realisasi		Target Akhir (%)
1	Persentase Desa Mandiri	%	39,69%	48,09%	121%	42,75%

Berdasarkan Tabel 4.4 terlihat bahwa dari indikator kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon dengan indikator **kinerja Persentase Desa mandiri** realisasi pada tahun 2024 sebesar **48,09 %** yang mana target akhir renstra mencapai **42,75%** telah melampaui Target yang ditetapkan, dan perlu dilakukan **penyesuaian Target Indikator tersebut**

Gambar 4.2 Capaian Kinerja Tahun 2024 Dibandingkan Target Akhir Renstra



**3.Target dan Realisasi Kinerja Per Triwulan Tahun 2024**

bahwa pencapaian target tahunan indikator Persentase Desa Mandiri 48.09% tercapai pada triwulan III Tahun 2024

**4.Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat dengan Kementerian Desa PDTT**

Tabel 4.5 Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat dengan Kementerian Desa PDTT

No	Indikator Kinerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Tahun 2024			Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2024		
		Tahun 2023	Tahun 2024	Peningkatan Capaian	Tahun 2023	Tahun 2024	Peningkatan Capaian
1.	Persentase Desa Mandiri (%)	38,93 %	<b>48,09%</b>	9,1%	8,5 %	<b>22,86%</b>	14,3%
2.	Jumlah desa Mandiri	51	63		11.456	17.203	
3.	Jumlah Pekon/Desa	131	131		75.265	75.265	

Sumber Data : Kementerian Desa PDTT

Berdasarkan Tabel 4.5 terlihat bahwa dari indikator kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon dengan indikator **kinerja Persentase Desa mandiri** realisasi pada tahun 2024 sebesar **48,09 %** yang mana Kementerian Desa PDTT **22,86%**



**5. Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat dengan Capaian Provinsi Lampung**

Tabel. 4.6 Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat dengan Capaian Provinsi Lampung

No	Indikator Kinerja	Capaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon			Capaian Provinsi Lampung		
		Tahun 2023	Tahun 2024	Capaian	Tahun 2023	Tahun 2024	Capaian
1.	Persentase Desa Mandiri (%)	38,93%	<b>48,09%</b>	9,1%	<b>7.4%</b>	<b>14,67%</b>	7,2%
2.	Jumlah desa Mandiri	51	63		181	359	
3.	Jumlah Pekon/Desa	131	131		2.466	2.466	

Sumber Data : Kementrian Desa PDTT

Berdasarkan Tabel 4.6 terlihat bahwa dari indikator kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon dengan indikator **kinerja Persentase Desa mandiri** realisasi pada tahun 2024 sebesar **48,09 %** dan Provinsi Lampung **7,2%**

**6.Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat dengan Capaian Kabupaten Lampung Selatan**

Tabel. 4.7 Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat dengan Capaian Kabupaten Lain

No	Indikator Kinerja	Capaian Lampung Barat	Capaian Lampung Selatan
		2024	2024
	Persentase Desa Mandiri (%)	<b>48,09%</b>	8,06%
	Jumlah desa Mandiri	63	20
	Jumlah Desa	131	116

Sumber Data : Kementrian Desa PDTT

Berdasarkan Tabel 4.7 terlihat bahwa dari indikator kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon dengan indikator **kinerja Persentase Desa mandiri** realisasi pada tahun 2024 sebesar **48,09 %** dan Kabupaten Lampung Selatan **8,06%**



#### 4. Benchmarking

Persentase Desa Mandiri Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan Persentase Desa Mandiri Provinsi Lampung. Jika dibandingkan dengan Propinsi Lampung **48,09% / 14,67 %** selisih **33%**. Persentase Desa Mandiri di Kabupaten Lampung Barat sudah Cukup Baik dan **Paling Banyak Desa Mandiri se Provinsi Lampung.**

##### Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2024

Indeks Ketahanan Sosial (IKS) : 0,8441

Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) : 0,6762

Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) : 0,8829

Pada Tahun 2024 Persentase Desa Mandiri mengalami kenaikan secara signifikan hal ini disebabkan oleh capaian skoring pada saat penilaian dimana skor pada **indikator ketahanan lingkungan (IKL) meliputi** Kualitas Lingkungan, Tangguh Bencana Alam, Tanggap Bencana **memiliki skor yang baik**, sehingga skor tersebut dapat membantu mendongkrak skor yang lain sehingga didapatkan skor rata-rata yang baik

#### C. Realisasi Anggaran

Untuk Mencapai sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2024 mendapat anggaran sebesar Rp. **5.457.361.916** dengan jumlah program 5 program 9 kegiatan dan 38 Sub Kegiatan. Dari anggaran yang telah dianggarkan maka diakhir tahun 2024 teralisasi sebesar **Rp 5.164.199.705** atau **94,6 %**.

Realisasi Program dan Kegiatan yang dilaksanakan untuk Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah sebagai berikut :

#### I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

##### Kegiatan :

##### 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

##### Sub Kegiatan :

##### a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Sub.Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Tahun Anggaran 2024 dengan jumlah dana sebesar Rp. 4.999.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.999.900,- sisa anggaran Rp. 0 atau sebesar 100% dana terserap dengan Indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah realisasi Dokumen .



**b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.**

Sub.Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD pada Tahun Anggaran 2024 dengan jumlah dana sebesar Rp. 6.825.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.825.000,- sisa anggaran Rp. 0,- atau sebesar 100 % dana terserap dengan Indikator Jumlah Koordinasi dan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen

**c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.**

Sub.Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD pada Tahun Anggaran 2024 dengan jumlah dana sebesar Rp. 5.725.000,- dan terealisasi sebesar Rp 5.725.000,- sisa anggaran Rp.0,- atau sebesar 100% dana terserap dengan indikator Jumlah Koordinasi dan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 dokumen.

**d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.**

Sub.Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD pada Tahun Anggaran 2024 dengan jumlah dana sebesar Rp. 3.765.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.765.000,- sisa anggaran Rp. 25.000,- atau sebesar 100% dana terserap dengan Inikator jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen

**e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.**

Sub.Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD pada Tahun Anggaran 2024 dengan jumlah dana sebesar Rp. 5.050.200,- dan teralisasi sebesar Rp. 5.050.200,- sisa anggaran Rp. 0,- atau sebesar 100% dana terserap dengan Indikator Jumlah Koordinasi dan Dokumen Perubahan DPA-SKPD. 1 Dokumen

**f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.**

Sub.Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pada Tahun Anggaran 2024 dengan jumlah dana sebesar Rp. 2.299.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 2.299.000,- sisa anggaran Rp. 55.000,- atau sebesar 97,61% dengan Indikator Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 laporan.

**g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.**

Sub.Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada Tahun Anggaran 2023 dengan jumlah dana sebesar Rp. 5.000.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 5.000.000,- sisa anggaran Rp. 0,- atau sebesar



100% dengan Indikator Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Laporan

## **2.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.**

### **Sub Kegiatan :**

#### **h. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.**

Sub.Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada Tahun Anggaran 2024 dengan jumlah dana sebesar Rp. 2.518.968.786,- dan terealisasi sebesar Rp2.253,953,451,- sisa anggaran Rp. 265.015.335,- atau sebesar 89% dana terserap dengan indicator Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan 26 orang

#### **i. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**

Sub.Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD pada Tahun Anggaran 2024 dengan jumlah dana sebesar Rp.1.890.200,- dan teralisasi sebesar Rp. 1.890.200,- sisa anggaran Rp. 0,- atau sebesar 100 % dana terserap dengan Indikator Tersedianya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan

#### **j. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/ Semesteran SKPD.**

Sub.Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/ Semesteran SKPD pada Tahun Anggaran 2024 dengan jumlah dana sebesar Rp. 1.890.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 1.890.000,- sisa anggaran Rp. 0,- atau 100% dana terserap dengan Indikator Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semeseran SKPD 2 Dokumen

#### **k. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.**

Sub.Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran pada Tahun Anggaran 2024 dengan jumlah dana sebesar Rp. 2.509.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.509.800 sisa anggaran Rp.0,- atau sebesar 100% dana terserap dengan Indikator Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen

## **2. Administrasi Umum Perangkat Daerah.**

### **Sub Kegiatan :**

#### **a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.**



Sub.Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pada Tahun Anggaran 2024 dengan jumlah dana sebesar Rp. 3.419.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.419.000,-, sisa anggaran Rp. 0,- atau sebesar 100% dana terserap dengan Indikator Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Banguna Kantor yang di sediakan 1 Paket

**b. Tersediaya Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Sub Kegiatan Tersediaya Peralatan dan Perlengkapan Kantor ada Tahun 2024 dengan dengan jumlah dana sebesar Rp.16.000.000 dan teralisasi sebesar Rp. 16.000.000,- sisa anggaran Rp. 0,- atau sebesar 100 % dana terserap dengan indicator jumah Peralatan dan Perlengkapan kantor 1 Unit

**b. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan pada Tahun Anggaran 2024 dengan jumlah dana sebesar Rp. 31.846.600,- dan teralisasi sebesar Rp. 31.846.600,- sisa anggaran Rp. 0,- atau sebesar 100 % dana terserap dengan Indikator Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan 9 paket.

**c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**

Sub.Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan pada Tahun Anggaran 2024 dengan jumlah dana sebesar Rp.5.010.000,- dan teralisasi sebesar Rp 5.010.000,-, sisa anggaran Rp. 0,- atau 100% dana terserap dengan mlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 dokumen.

**d. Fasilitas Kunjungan Tamu.**

Sub.Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu pada Tahun Anggaran 2024 dengan jumlah dana sebesar Rp.5.355.000,- dan teralisasi sebesar Rp5.355.000,- sisa anggaran Rp. 0,- atau 100% dana terserap dengan Jumlah laporan Pasilitasi Kunjungan Tamu Perbulan 12 laoran

**e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.**

Sub.Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada Tahun Anggaran 2024 dengan jumlah dana sebesar Rp.106.239.000,- dan teralisasi sebesar Rp 105.779.835,- sisa anggaran Rp. 0,- atau 100% dana terserap dengan Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 laporan

**3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**

---





**Sub Kegiatan :**

**a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.**

Sub.Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat pada Tahun Anggaran 2023 dengan jumlah dana sebesar Rp. 6.440.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.440.000,- sisa anggaran Rp.0,- atau sebesar 100% dana terserap dengan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surat Menyurat 1 laporan

**b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

Sub.Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Tahun Anggaran 2024 dengan jumlah dana sebesar Rp.21.500.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 19.865.020,- sisa anggaran Rp. 1.634.980,- atau sebesar 94,48 % dana terserap dengan umlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan listrik yang di sediakan 1 laporan

**c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.**

Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Tahun Anggaran 2024 dengan jumlah dana sebesar Rp.93.882.580,- dan teralisasi sebesar Rp.83.095.380,- sisa anggaran Rp.10.787.200,- atau 99.55% dana terserap dengan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 laoran

**4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**

**Sub Kegiatan :**

**a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.**

Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,BiayaPemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Tahun Anggaran 2024 dengan jumlah dana sebesar Rp.47.750.000,- dan terealisasi sebesar Rp.71.519.750,- sisa anggaran Rp. 3.765.250,- atau sebesar 92,83% dana terserap dengan Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara dan dibayar Pajaknya 9 unit

**b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**

Sub.Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada Tahun Anggaran 2024 dengan jumlah dana sebesar Rp. 5.190.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 5.190.000,- sisa anggaran Rp.0,- atau sebesar 100% dana terserap dengan hasil Tertib dan Lancarnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

**c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**



Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pada Tahun Anggaran 2024 dengan jumlah dana sebesar Rp. 9.991.250,- dan teralisasi sebesar Rp. 9.991.250,- sisa anggaran Rp.0,- atau sebesar 100% dana terserap dengan Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di Pelihara/Direhabilitasi 1 Unit

## **II. PROGRAM PENATAAN DESA**

### **Keg.Penyelenggaraan Penataan Desa**

**Sub** Kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa Tahun Anggaran 2023 dengan jumlah dana sebesar Rp. 61.030.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 1,101.766.600 sisa anggaran Rp. 1.100.876.504

atau sebesar 99,9% dana terserap dengan Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa **1 unit**

## **III. PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**

### **Keg.Fasilitasi Kerja Sama antar Desa**

Sub.Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa pada Tahun Anggaran 2024 dengan jumlah dana sebesar Rp. 39.459.300,- dan terealisasi sebesar Rp. 39.433.950,- sisa anggaran Rp. 3.677.500 atau sebesar 99,9% dana terserap dengan Jumlah Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 1 Dokumen

## **IV. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**

**Kegiatan :**

**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**

**Sub Kegiatan :**

#### **a. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa**

Sub.Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa pada Tahun Anggaran 2024 dengan jumlah dana sebesar Rp. 59.188.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 57.133.150,- sisa anggaran Rp.2.055.350,- atau sebesar 96,5% dana terserap dengan Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 2 Dokumen

#### **b. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa**

Sub.Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa pada Tahun Anggaran 2024 dengan jumlah dana sebesar Rp. 47.585.500,- dan



teralisasi sebesar Rp. 47.305.181 sisa anggaran Rp.280.319,- atau sebesar 99,32% dana terserap dengan Jumlah Dokumen Keuangan Desa 1 Dokumen

**c. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa**

Sub.Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa pada Tahun Anggaran 2024 dengan jumlah dana sebesar Rp. 56.983.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 56.504.550 sisa anggaran Rp.478.450,- atau sebesar 99.01% dana terserap dengan hasil Tertib,Lancar dan terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

**d. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desadan Lembaga Kerja Samaantar Desa**

Sub.Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan pada Tahun Anggaran 2023 dengan jumlah dana sebesar Rp.39.255.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 39.114.790 sisa anggaran Rp140.210,- atau sebesar 99,81% dana terserap dengan Jml Pembinaan danPemberdayaan BUM Desadan Lembaga Kerja Samaantar Desa 1 Dokumen

**e.Fasilitasi Penyusunan Profil Desa**

**Sub.**Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan pada Tahun Anggaran 2024 dengan jumlah dana sebesar Rp.49.236.000 dan terealisasi sebesar Rp. 49.234.000 sisa anggaran Rp. 0 atau sebesar 100 % dana terserap dengan Jumlah Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 136 Dokumen

**f. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD**

**Sub.**Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan pada Tahun Anggaran 2024 dengan jumlah dana sebesar Rp.43.595.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 43.595.000 sisa anggaran Rp. 0 atau sebesar 99,9 % dana terserap dengan Jumlah Anggota BPD yang mengikuti Pembinaan 105 orang

**G .Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa**

**Sub.**Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan pada Tahun Anggaran 2024 dengan jumlah dana sebesar Rp. 250.243.000,- dan terealisasi sebesar Rp.246.428.898 sisa anggaran Rp. 3.184.102 atau sebesar 98,4% dana terserap dengan Jumlah Dewsa yang terfasilitasi 10 Desa



**e. Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan**

Kegiatan Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan pada Tahun Anggaran 2023 dengan jumlah dana sebesar Rp. 112.768.600 dan terealisasi sebesar Rp. 106.479.676,- sisa anggaran Rp. 6.288.924,- atau sebesar 94.4% dana terserap dengan Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan 1 Dokumen.

**V. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**

**Kegiatan :**

- 1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**

**Sub Kegiatan :**

**a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan(RT, RW, PKK,Posyandu, LPM,dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat**

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan(RT, RW, PKK,Posyandu, LPM,dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat pada Tahun Anggaran 2024 dengan jumlah dana sebesar Rp. 51.289.000,- dan terealisasi sebesar Rp.51.289.000,- sisa anggaran Rp. 0,- atau sebesar 100% dana terserap dengan Jumlah asilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 4 Lembaga

**b. Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga**

Kegiatan Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga pada Tahun Anggaran 2024 dengan jumlah dana sebesar Rp.149.576.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 149.576.900,-,- sisa anggaran Rp. 0,- atau sebesar 100% dana terserap dengan Jml PeningkataKapasitasKelembagaanLembagaKemasyarakatanDesa/Kelurahan (RT, RW,PKK, Posyandu, LPM, danKarang Taruna),



Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 4  
Lembaga

c. **Fasilitasi Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna**

d. Sub.Kegiatan **Fasilitasi Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna** pada Tahun Anggaran 2024 dengan jumlah dana sebesar Rp.49.990.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 49.990.000,-, - sisa anggaran Rp. 0,- atau sebesar 100% dengan Jumlah Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan

e. Sub.Kegiatan **Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat** pada Tahun Anggaran 2024 dengan jumlah dana sebesar Rp. 60.276.500,-, - dan terealisasi sebesar Rp. 60.276.500,-, - sisa anggaran Rp. 0,- atau sebesar 100% dengan Jumlah Jumlah Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 1 Laporan

f. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga pada Tahun Anggaran 2024 dengan jumlah dana sebesar Rp. 433.247.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 433.247.000,- sisa anggaran Rp. 0,- atau sebesar 100% dengan Jumlah Jumlah Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluargat 1 Laporan

#### **D. Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Laporan Kinerja dibuat untuk mempermudah manajemen dalam melakukan penegendalian intern, serta untuk menunjukkan bahwa anggaran dibelanjakan secara Efisien dan bermanfaat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon serta untuk mengidentifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi selanjutnya untuk acuan perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan ditahun mendatang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.



LKJIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Kabupaten Lampung Barat dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

bahwa hasil evaluasi kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat dan seluruh pihak terkait. bahan pertimbangan untuk menetapkan target kinerja, menentukan strategi atau kegiatan yang lebih baik pada tahun berikutnya.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan Umum.

Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Kabupaten Lampung Barat dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024 anggaran Rp. **5.457.361.916** dengan jumlah program 5 program 9 kegiatan dan 38 Sub Kegiatan. Dari anggaran yang telah dianggarkan maka diakhir tahun 2024 teralisasi sebesar **Rp 5.164.199.705** atau **94,6 %**. **Tidak terserap Rp.293.162.211**

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Kabupaten Lampung Barat 2023 - 2026 menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 1 dari Empat tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2024, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 48,09 %

Indikator Tujuan yaitu Persentase Pekon dengan Status Mandiri pada tahun 2024 realisasi 48.09% dari target 39.69 % pekon Mandiri tahun 2024 sebanyak 63 pekon dengan pencapaian 121 % dari 131 Pekon di kabupaten lampung Barat

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar **Rp 5.164.199.705** telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Tujuan RPD **Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Inovatif dan Transparan** dan sasaran Strategis **Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan** Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Kabupaten Lampung Barat. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Kabupaten Lampung Barat adalah 94,6 % dari anggaran yang direncanakan, terdapat evisiensi sumberdaya pada tahun 2024 Capaian Indikato sebesar 48.09 % hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Kabupaten Lampung Barat perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Tujuan RPD **Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Inovatif dan Transparan** dan sasaran Strategis **Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan** Kabupaten Lampung Barat.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Kabupaten Lampung Barat ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan





Pekon Kabupaten Lampung Barat kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Lampung Barat.

**B. Faktor Pendukung Keberhasilan**

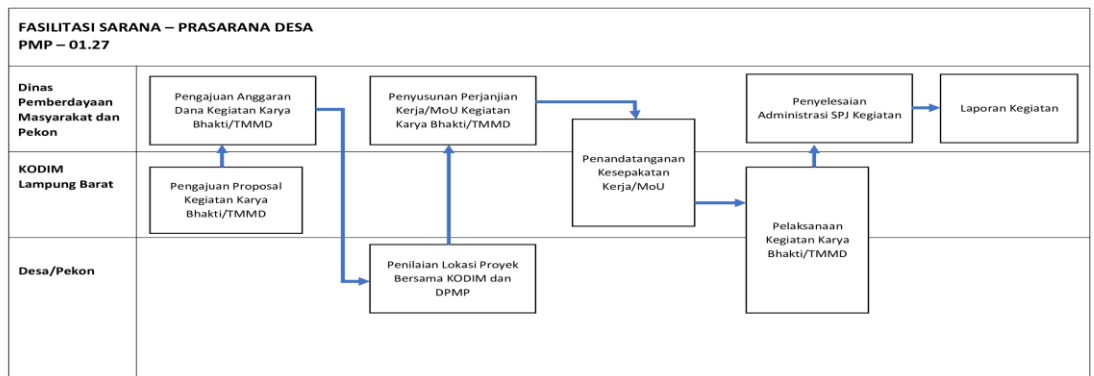
. Analisis Faktor pendukung keberhasilan

Beberapa faktor yang mempengaruhi kemandirian desa antara lain adanya potensi alam yang dapat dimanfaatkan, akses infrastruktur, ketersediaan sumber daya manusia yang terampil, serta dukungan dari pemerintah dan dunia usaha. Dalam proses kemajuan dan keberdayaan Desa yaitu meliputi aspek Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Ekologi (Lingkungan). Sehingga indeks ini difokuskan pada upaya penguatan otonomi Desa melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat Desa inilah yang akan menjadi tumpuan utama terjadinya proses peningkatan partisipasi yang berkualitas, peningkatan pengetahuan, dan peningkatan keterampilan, atau secara umum dapat disebut sebagai peningkatan kapasitas dan kapailitas masyarakat Desa

Untuk mencapai target tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon pada tahun 2024, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon memiliki hubungan dengan perangkat daerah dan instansi lain seperti dengan Dinas Lngkungan Hidup, Dinas Koperindag, Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan, PUPR, Dinas Kominfo, BPBD, Kodim, Inspektorat, Pekon, Kelurahan dan Kecamatan untuk melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan.

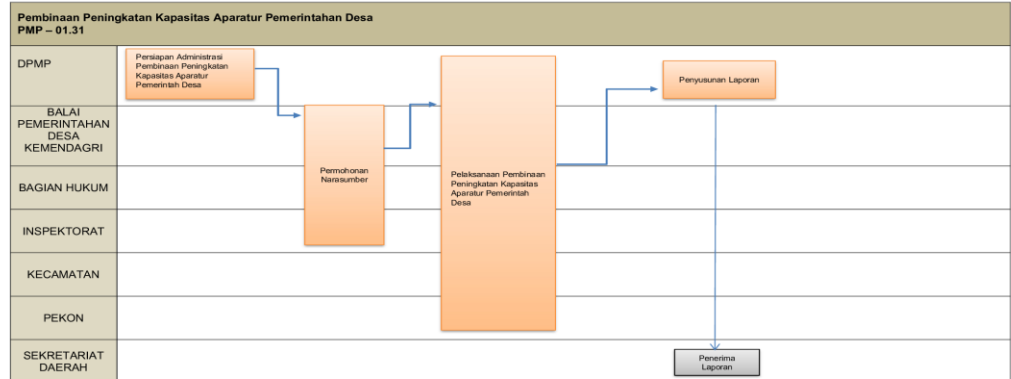
Peta proses bisnis program yang tertuang pada peta proses bisnis berikut ini:

Gambar 4.1 Peta proses bisnis Program Penataan Desa Penyelenggaraan Penatan Desa - Fasitas sarana dan Prasarana





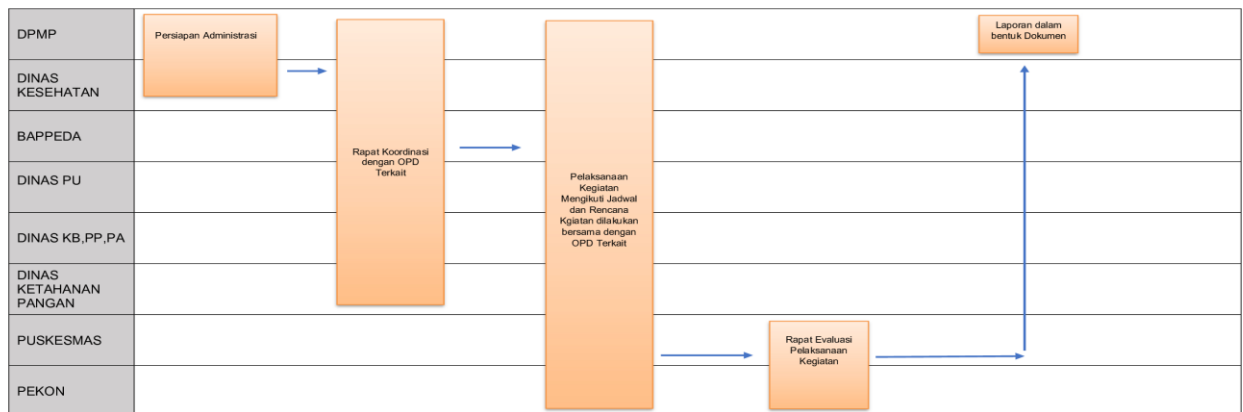
Gambar 4.1 Peta proses Program Administrasi Pemerintahan Pekon- Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa -Pembinaan Peningkatas kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa



Gambar 4.3 Peta proses bisnis Program Pembedayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (Rt,Rw,PKK,Posyandu, LPM,dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon)

PMP.01.40



### Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara Umum, pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan telah dapat dilaksanakan, demikian juga sasaran yang ditetapkan telah tercapai dengan hasil cukup baik, capaian kinerja yang relatif tinggi menunjukkan telah terlaksananya kegiatan dengan baik dan sesuai dengan yang direncanakan/ditargetkan. Tetapi penetapan target capaian kinerja untuk tahun mendatang masih perlu adanya peningkatan.

Untuk Meningkatnya Desa Mandiri dibutuhkan dukungan dan Kerjasama dengan berbagai Sektor atau OPD, antara lain :

1. Dinas Pendidikan dengan Program Pengelolaan Pendidikan terkait akses dan Ketersediaan Sekolah
2. Dinas Lingkungan Hidup dengan Program Pengendalian Pencemaran dan atau kerusakan Pencemaran (air, udara, tanah, limbah di sungai)
3. Dinas Koperindag dengan Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) terkait Pemberdayaan Usaha UMKM, Lembaga Ekonomi
4. Dinas Kominfo dengan Program Aplikasi dan Informatika terkait jangkauan Sinyal Desa, terhubung dengan Internet dan telekomunikasi
5. Dinas Kesehatan dengan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Terkait Akses sarana Kesehatan, Ketersediaan Tenaga Kesehatan Aktivitas Posyandu
6. Dinas PUPR dengan Program Penyelenggaraan Jalan terkait Ketersediaan Jalan

### **C. Permasalahan**

1. Infrastruktur Desa yang Terbatas
  - Masih banyak Desa yang menghadapi masalah,
  - terbatasnya infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, listrik, dan air bersih,
  - Kondisi infrastruktur yang buruk menghambat mobilitas masyarakat dan akses ke layanan publik.
- 2..Sumber Daya Manusia yang Kurang Memadai
  - Tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat Desa yang relatif rendah,
  - Kurangnya tenaga ahli dan profesional yang mau berkarya di Desa.
  - Kemampuan aparatur Desa dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan masih terbatas.
- 3..Kemiskinan dan Kesenjangan Ekonomi
  - Sebagian besar masyarakat Desa masih hidup di bawah garis kemiskinan.
  - Keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi produktif, seperti lahan, modal, dan teknologi.
  - Kesenjangan ekonomi antara masyarakat Desa dan perkotaan masih cukup tinggi.
4. Degradasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam
  - Kerusakan hutan, tanah, dan sumber daya air akibat eksploitasi yang berlebihan.
  - Pencemaran lingkungan, seperti sampah dan limbah, yang belum tertangani dengan baik.
  - Dampak perubahan iklim yang memengaruhi sektor pertanian dan perikanan.



- 5 Partisipasi Masyarakat yang Rendah
- Kurangnya keterlibatan masyarakat Desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
  - Rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan Desa.
  - Masih kuatnya dominasi elit lokal dalam pengambilan keputusan di Desa.

#### **D. Rekomendasi dan Tindak Lanjut**

Upaya penyelesaian masalah dan rencana proyeksi pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024, antara lain :

1. Peningkatan Infrastruktur Desa dengan Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar di Desa, Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur Desa.
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia Desa dengan Meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur Desa melalui pelatihan dan pendidikan, Mendorong kemitraan dengan perguruan tinggi dan lembaga pelatihan untuk mengembangkan SDM Desa.
3. Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Kesenjangan dengan mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa untuk program pengentasan kemiskinan, Mendorong diversifikasi ekonomi Desa dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.
4. Perlindungan Lingkungan dan Sumber Daya Alam dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam Desa, Melibatkan masyarakat Desa dalam upaya konservasi lingkungan dan sumber daya alam.
5. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dengan memperkuat sistem demokrasi Desa dan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, Mendorong keterlibatan masyarakat Desa dalam setiap tahapan pembangunan.
6. Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Interna melalui Aplikasi SAKTI BERKIBAR

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN PEKON

BULKI, S. Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690915 199408 1 001

# **RENCANA AKSI 2024 PERANGKAT DAERAH**

## **DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON TAHUN 2023-2026**



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
Jl. Tulip No.1 Way Mengaku Telp/Fax (0728) 21158**

Lampiran I

**Rencana Aksi Tingkat Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon**  
**Periode 2023 - 2026**  
**Tahun 2024**

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tujuan Akumulatif				Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Akumulatif				Nama Jabatan Penanggung Jawab
			Trw 1	Trw 2	Trw 3	Trw 4			Trw 1	Trw 2	Trw 3	Trw 4	
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	% Desa Mandiri	37,40%	39,69%	41,22%	42,75%	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Pekon Secara Partisipatif	Persentase Desa mandiri	37,40%	39,69%	41,22%	42,75%	Drs.Syaekhuudin,MM

Liwa, 01 Februari 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN PEKON



Drs. SYAEKHUDDIN,MM  
NIP. 19680913 198909 1 002

**Rencana Aksi Tingkat Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon**  
**Periode 2023 - 2026**  
**Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kinerja Per triwulan Akumulatif	Keuangan Per triwulan Akumulatif	Nama Jabatan Penanggung Jawab
					Target	Target	
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Pekon Secara Partisipatif	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah bidang urusan yang dilaksanakan	<b>Trw 1 = 1 bidang Urusan</b>	<b>629,036,953</b>	SAHRIL, S.Pd.,MM
					<b>Trw 2 = 1 bidang Urusan</b>	<b>1,523,281,962</b>	
					<b>Trw 3 = 1 bidang Urusan</b>	<b>2,061,722,785</b>	
					<b>Trw 4 = 1 bidang Urusan</b>	<b>2,573,120,630</b>	
2		PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang memenuhi syarat penataan Desa yang ditata	Persentase Desa yang memenuhi syarat penataan Desa yang ditata	<b>Trw 1 = 100%</b>	<b>340,647,600</b>	Desmon Irawan, ST.
					<b>Trw 2 =100%</b>	<b>1,071,866,600</b>	
					<b>Trw 3 = 100%</b>	<b>1,084,766,600</b>	
					<b>Trw 4 =100%</b>	<b>1,101,766,600</b>	
3		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	persentase Peningkatan Kerja sama Antar Pekon Pekon untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat	persentase Peningkatan Kerja sama Antar Pekon Pekon untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat	<b>Trw 1 = 2,29%</b>	<b>9,484,300</b>	Desmon Irawan, ST.
					<b>Trw 2 = 2,29%</b>	<b>19,789,300</b>	
					<b>Trw 3 = 2,29%</b>	<b>30,959,300</b>	
					<b>Trw 4 = 2,29%</b>	<b>39,459,300</b>	
4		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Pekon Tertib Administrasi	<b>Trw 1 = 100 %</b>	<b>95,531,500</b>	FAUZAN ARIADI, SE.MM
					<b>Trw 2 = 100 %</b>	<b>254,268,100</b>	
					<b>Trw 3 =100 %</b>	<b>370,108,100</b>	
					<b>Trw 4 = 100 %</b>	<b>408,612,100</b>	
5		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN. LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	<b>Trw 1 = 65 %</b>	<b>270,747,900</b>	ELPIN JAYA, S.Sos.,MM
					<b>Trw 2 = 65%</b>	<b>548,042,400</b>	
					<b>Trw 3 = 65%</b>	<b>579,474,900</b>	
					<b>Trw 4 = 65%</b>	<b>638,931,900</b>	

Liwa, 01 Februari 2024

4,761,890,530





**Rencana Aksi Tingkat Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon**  
**Periode 2023 - 2026**  
**Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja Per triwulan Akumulatif	Keuangan Per triwulan Akumulatif	Nama Jabatan Penanggung Jawab
						Target	Target	
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Pekon Secara Partisipatif	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Trw 1 = 8 Dokumen	15,589,800	SAHRIL, S.Pd.,MM
						Trw 2 = 8 Dokumen	28,653,800	
						Trw 3 = 8 Dokumen	33,624,000	
						Trw 4 = 8 Dokumen	33,664,000	
2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Trw 1 = 5 Dokumen	471,266,523	SAHRIL, S.Pd.,MM
						Trw 2 = 5 Dokumen	1,262,330,532	
						Trw 3 = 5 Dokumen	1,733,597,055	
						Trw 4 = 5 Dokumen	2,206,753,400	
4			Administrasi Umum Perangkat Daerah			Trw 1 = 8 Paket	60,611,000	SAHRIL, S.Pd.,MM
						Trw 2 = 8 Paket	102,521,000	
						Trw 3 = 8 Paket	133,402,900	
						Trw 4 = 8 Paket	147,949,400	
5			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Trw 1 = 2 laporan	43,013,380	SAHRIL, S.Pd.,MM
						Trw 2 = 2 laporan	81,095,380	
						Trw 3 = 2 laporan	105,292,580	
						Trw 4 = 2 laporan	121,822,580	
6			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Trw 1 = 22 Unit	38,556,250	SAHRIL, S.Pd.,MM
						Trw 2 = 22 Unit	48,681,250	
						Trw 3 = 22 Unit	55,806,250	
						Trw 4 = 22 Unit	62,931,250	
7	PROGRAM PENATAAN DESA		Penyelenggaraan Penataan Desa			Trw 1 = 100 %	340,647,600	Desmon Irawan, ST.
						Trw 2 = 100 %	1,071,866,600	
						Trw 3 = 100 %	1,084,766,600	
						Trw 4 = 100 %	1,101,766,600	
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR DESA		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa			Trw 1 = 2,29 %	9,484,300	Desmon Irawan, ST.
						Trw 2 = 2,29 %	19,789,300	
						Trw 3 = 2,29 %	30,959,300	

					Trw 4 = 2,29 %	39,459,300	
7	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			Trw 1 = 100 % Trw 2 = 100 % Trw 3 = 100 % Trw 4 = 100 %	95,531,500 254,268,100 370,108,100 408,612,100	FAUZAN ARIADI, SE.MM
8	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			Trw 1 = 65 % Trw 2 = 65% Trw 3 = 65% Trw 4 = 65%	270,747,900 548,042,400 579,474,900 638,931,900	ELPIN JAYA, S.Sos.,MM

Liwa, 1 Februari 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN PEKON



**Rencana Aksi Tingkat Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon  
Periode 2023 - 2026  
Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja Per triwulan Akumulatif	Keuangan Per triwulan Akumulatif	Nama Jabatan Penanggung Jawab
							Target	Target	
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Pekon Secara Partisipatif	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<b>Trw 1 = 2 Dokumen</b>	<b>4,999,800</b>	SAHRIL, S.Pd.,MM
							<b>Trw 2 = 2 Dokumen</b>	<b>4,999,800</b>	
							<b>Trw 3 = 2 Dokumen</b>	<b>4,999,800</b>	
							<b>Trw 4 = 2 Dokumen</b>	<b>4,999,800</b>	
2			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Dokumen RKA-SKPD	<b>Trw 1 = 1 dokumen</b>	<b>6,825,000</b>	SAHRIL, S.Pd.,MM
							<b>Trw 2 = 1 dokumen</b>	<b>6,825,000</b>	
							<b>Trw 3 = 1 dokumen</b>	<b>6,825,000</b>	
							<b>Trw 4 = 1 dokumen</b>	<b>6,825,000</b>	
3				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	SAHRIL, S.Pd.,MM
							<b>Trw 2 = 1 dokumen</b>	<b>5,725,000</b>	
							<b>Trw 3 = 1 dokumen</b>	<b>5,725,000</b>	
							<b>Trw 4 = 1 dokumen</b>	<b>5,725,000</b>	
4				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	<b>Trw 1 = 2 dokumen</b>	<b>3,765,000</b>	SAHRIL, S.Pd.,MM
							<b>Trw 2 = 2 dokumen</b>	<b>3,765,000</b>	
							<b>Trw 3 = 2 dokumen</b>	<b>3,765,000</b>	
							<b>Trw 4 = 2 dokumen</b>	<b>3,765,000</b>	
5				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersediannya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Koordinasi dan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	-	SAHRIL, S.Pd.,MM
							<b>Trw 2 = 1 dokumen</b>	<b>40,000</b>	
							<b>Trw 3 = 1 dokumen</b>	<b>5,010,200</b>	

					Perubahan DPA		<b>Trw 4 = 1 dokumen</b>	<b>5,050,200</b>	
6				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<b>Trw 1 = 1 Laporan</b>	-	SAHRIL, S.Pd.,MM
							<b>Trw 2 = 1 Laporan</b>	<b>2,299,000</b>	
							<b>Trw 3 = 1 Laporan</b>	<b>2,299,000</b>	
							<b>Trw 4 = 1 Laporan</b>	<b>2,299,000</b>	
7				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<b>Trw 1 = 12 Laporan</b>	-	SAHRIL, S.Pd.,MM
							<b>Trw 2 = 12 Laporan</b>	<b>5,000,000</b>	
							<b>Trw 3 = 12 Laporan</b>	<b>5,000,000</b>	
							<b>Trw 4 = 12 Laporan</b>	<b>5,000,000</b>	
8			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	<b>Trw 1 = 26 Orang/Bulan</b>	<b>471,266,523</b>	Eka Indriyanti, S.IP
							<b>Trw 2 = 26 Orang/Bulan</b>	<b>1,256,710,732</b>	
							<b>Trw 3 = 26 Orang/Bulan</b>	<b>1,727,977,255</b>	
							<b>Trw 4 = 26 Orang/Bulan</b>	<b>2,199,243,400</b>	
9				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah lap Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	Eka Indriyanti, S.IP
							<b>Trw 2 = 4 laporan</b>		
							<b>Trw 3 = 4 laporan</b>		
							<b>Trw 4 = 4 laporan</b>	<b>1,890,200</b>	
10				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Tersedianya Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	-	-	Eka Indriyanti, S.IP
							<b>Trw 2 = 1 laporan</b>	<b>3,110,000</b>	
							<b>Trw 3 = 1 laporan</b>	<b>3,110,000</b>	
							<b>Trw 4 = 1 laporan</b>	<b>3,110,000</b>	
11				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	<b>Trw 1 = 2 Dokumen</b>	-	Eka Indriyanti, S.IP
							<b>Trw 2 = 2 Dokumen</b>	<b>2,509,800</b>	

					Prognosis Realisasi Anggaran		<b>Trw 3 = 2 Dokumen</b>	<b>2,509,800</b>	
							<b>Trw 4 = 2 Dokumen</b>	<b>2,509,800</b>	
13			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	<b>Trw 1 = 1 Paket</b>	<b>3,149,000</b>	SAHRIL, S.Pd.,MM
							<b>Trw 2 = 1 Paket</b>	<b>3,149,000</b>	
							<b>Trw 3 = 1 Paket</b>	<b>3,149,000</b>	
							<b>Trw 4 = 1 Paket</b>	<b>3,149,000</b>	
15				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jml Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	<b>Trw 1 = 9 Paket</b>	<b>12,607,000</b>	SAHRIL, S.Pd.,MM
							<b>Trw 2 = 9 Paket</b>	<b>25,847,000</b>	
							<b>Trw 3 = 9 Paket</b>	<b>32,251,400</b>	
							-	<b>32,251,400</b>	
16				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jml Dokumn Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<b>Trw 1 = 4 Dokumen</b>	<b>855,000</b>	SAHRIL, S.Pd.,MM
							<b>Trw 2 = 4 Dokumen</b>	<b>2,525,000</b>	
							<b>Trw 3 = 4 Dokumen</b>	<b>3,777,500</b>	
							<b>Trw 4 = 4 Dokumen</b>	<b>5,010,000</b>	
17				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumah Laporan Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	<b>Trw 1 = 12 Laporan</b>	<b>1,000,000</b>	SAHRIL, S.Pd.,MM
							<b>Trw 2 = 12 Laporan</b>	<b>3,000,000</b>	
							<b>Trw 3 = 12 Laporan</b>	<b>5,355,000</b>	
							<b>Trw 4 = 12 Laporan</b>	<b>5,355,000</b>	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumah lap Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	<b>Tw 1 =</b>	<b>16,000,000</b>	SAHRIL, S.Pd.,MM
							<b>Tw 2 =</b>	<b>16,000,000</b>	
							<b>Tw 3 =</b>	<b>16,000,000</b>	
							<b>Tw 4 =</b>	<b>16,000,000</b>	
18				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraa	Jumah lapran Penyelenggaraan Ranat Koordinasi	<b>Trw 1 = 12 Laporan</b>	<b>27,000,000</b>	SAHRIL, S.Pd.,MM

				n Rapat Koordinasi dan Kunsultasi SKPD	dan Kunsultasi SKPD	<b>Trw 2 = 12 Laporan</b> <b>52,000,000</b>		
						<b>Trw 3 = 12 Laporan</b> <b>72,870,000</b>		
						<b>Trw 4 = 12 Laporan</b> <b>86,184,000</b>		
19			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<b>Trw 1 = 1 Laporan</b> <b>2,500,000</b>	SAHRIL, S.Pd.,MM
							<b>Trw 2 = 1 Laporan</b> <b>4,940,000</b>	
							<b>Trw 3 = 1 Laporan</b> <b>6,440,000</b>	
							<b>Trw 4 = 1 Laporan</b> <b>6,440,000</b>	
20				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<b>Trw 1 = 1 Laporan</b> <b>7,850,000</b>	SAHRIL, S.Pd.,MM
							<b>Trw 2 = 1 Laporan</b> <b>13,700,000</b>	
							<b>Trw 3 = 1 Laporan</b> <b>18,650,000</b>	
							<b>Trw 4 = 1 Laporan</b> <b>21,500,000</b>	
21				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	<b>Trw 1 = 1 Laporan</b> <b>32,663,380</b>	SAHRIL, S.Pd.,MM
							<b>Trw 2 = 1 Laporan</b> <b>62,455,380</b>	
							<b>Trw 3 = 1 Laporan</b> <b>80,202,580</b>	
							<b>Trw 4 = 1 Laporan</b> <b>93,882,580</b>	
22			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Jumlah laporan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	<b>Trw 1 = 9 Unit</b> <b>23,375,000</b>	SAHRIL, S.Pd.,MM
							<b>Trw 2 = 9 Unit</b> <b>33,500,000</b>	
							<b>Trw 3 = 9 Unit</b> <b>40,625,000</b>	
							<b>Trw 4 = 9 Unit</b> <b>47,750,000</b>	
23				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<b>Trw 1 = 12 Unit</b> <b>5,190,000</b>	SAHRIL, S.Pd.,MM
							<b>Trw 2 = 12 Unit</b> <b>5,190,000</b>	
							<b>Trw 3 = 12 Unit</b> <b>5,190,000</b>	
							<b>Trw 4 = 12 Unit</b> <b>5,190,000</b>	

24				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<b>Trw 1 = 1Unit</b>	<b>9,991,250</b>	SAHRIL, S.Pd.,MM	
							<b>Trw 2 = 1Unit</b>	<b>9,991,250</b>		
							<b>Trw 3 = 1 Unit</b>	<b>9,991,250</b>		
							<b>Trw 4 = 1 Unit</b>	<b>9,991,250</b>		
		PROGRAM PENATAAN DESA	Penyelenggaraan Penataan Desa	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Terlaksananya Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		<b>Trw 1 = 1 Unit</b>	<b>340,647,600</b>	Desmon Irawan, ST.
							<b>Trw 2 = 1 Unit</b>	<b>1,071,866,600</b>		
							<b>Trw 3 = 1 Unit</b>	<b>1,084,766,600</b>		
							<b>Trw 4 = 1 Unit</b>	<b>1,101,766,600</b>		
		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Terlaksananya Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		<b>Trw 1 = 1 Dokumen</b>	<b>9,484,300</b>	
							<b>Trw 2 = 1 Dokumen</b>	<b>19,789,300</b>		
							<b>Trw 3 = 1 Dokumen</b>	<b>30,959,300</b>		
							<b>Trw 4 = 1 Dokumen</b>	<b>39,459,300</b>		
25	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Juah Dok Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa		<b>Trw 1 = 2 Dokumen</b>	<b>30,593,500</b>	FAUZAN ARIADI, SE.MM	
							<b>Trw 2 = 2 Dokumen</b>	<b>35,593,500</b>		
							<b>Trw 3 = 2 Dokumen</b>	<b>59,188,500</b>		
							<b>Trw 4 = 2 Dokumen</b>	<b>59,188,500</b>		
26			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terfasilitasinya Pengelolaan Keuangan Desa	Jumah Terfasilitasinya Pengelolaan Keuangan Desa		<b>Trw 1 = 2 Dokumen</b>	<b>11,326,000</b>	FAUZAN ARIADI, SE.MM	
							<b>Trw 2 = 2 Dokumen</b>	<b>16,631,500</b>		
							<b>Trw 3 = 2 Dokumen</b>	<b>32,521,500</b>		
							<b>Trw 4 = 2 Dokumen</b>	<b>47,585,500</b>		
27			Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Terbinanya Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Juah Terbinanya Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		<b>Trw 1 = 2 Dokumen</b>	<b>25,933,000</b>	FAUZAN ARIADI, SE.MM	
							<b>Trw 2 = 2 Dokumen</b>	<b>30,183,000</b>		
							<b>Trw 3 = 2 Dokumen</b>	<b>56,983,000</b>		



							<b>Trw 4 = 2 Dokumen</b>	<b>56,983,000</b>	
			Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa	Terbinanya Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa	Jumah Dokumen Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa		<b>Trw 1 = 2 Dokumen</b>	<b>24,550,000</b>	FAUZAN ARIADI, SE.MM
							<b>Trw 2 = 2 Dokumen</b>	<b>39,255,000</b>	
							<b>Trw 3 = 2 Dokumen</b>	<b>39,255,000</b>	
							<b>Trw 4 = 2 Dokumen</b>	<b>39,255,000</b>	
			Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Terfasilitasinya Penyusunan Profil Desa	Jumlah DokFasilitasi Penyusunan Profil Desa		<b>Trw 1 = 2 Dokumen</b>	<b>639,000</b>	FAUZAN ARIADI, SE.MM
							<b>Trw 2 = 2 Dokumen</b>	<b>20,155,500</b>	
							<b>Trw 3 = 2 Dokumen</b>	<b>20,155,500</b>	
							<b>Trw 4 = 2 Dokumen</b>	<b>43,595,500</b>	
			Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Terbnanya Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD		<b>Trw 1 = 2 Dokumen</b>	<b>2,490,000</b>	FAUZAN ARIADI, SE.MM
							<b>Trw 2 = 2 Dokumen</b>	<b>14,236,000</b>	
							<b>Trw 3 = 2 Dokumen</b>	<b>49,236,000</b>	
							<b>Trw 4 = 2 Dokumen</b>	<b>49,236,000</b>	
28			Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Terfasilitasinya Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumah Dok Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		<b>Trw 1 = 2 Dokumen</b>	-	Desmon Irawan, ST.
							<b>Trw 2 = 2 Dokumen</b>	<b>98,213,600</b>	
							<b>Trw 3 = 2 Dokumen</b>	<b>112,768,600</b>	
							<b>Trw 4 = 2 Dokumen</b>	<b>112,768,600</b>	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN. LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Adat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	fasilitasi penataan, Pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT. RW. PKK. Posyandu. LPM. dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Terfasilitasinya penataan, Pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan n Desa/Kelurahan (RT. RW. PKK. Posyandu. LPM. dan Karang Taruna). Lembaga Adat	Jumlah JPemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya	<b>Trw 1 = 2 Dokumen</b>	<b>25,179,500</b>	ELPIN JAYA, S.Sos.,MM
							<b>Trw 2 = 2 Dokumen</b>	<b>51,289,500</b>	
							<b>Trw 3 = 2 Dokumen</b>	<b>51,289,500</b>	
							<b>Trw 4 = 2 Dokumen</b>	<b>51,289,500</b>	

			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT. RW. PKK. Posyandu. LPM. dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT. RW. PKK. Posyandu. LPM. dan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT. RW. PKK. Posyandu. LPM. dan Karang Taruna). Lembaga Adat	<b>Trw 1 = 4 Lembaga</b> <b>Trw 2 = 4 Lembaga</b> <b>Trw 3 = 4 Lembaga</b> <b>Trw 4 = 4 Lembaga</b>	<b>122,551,900</b> <b>149,576,900</b> <b>149,576,900</b> <b>149,576,900</b>	
			Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Terlaksananya Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	<b>Trw 1 = 1 Laporan</b> <b>Trw 2 = 1 Laporan</b> <b>Trw 3 = 1 Laporan</b> <b>Trw 4 = 1 Laporan</b>	<b>9,925,000</b> <b>49,990,000</b> <b>49,990,000</b> <b>49,990,000</b>	ELPIN JAYA, S.Sos.,MM
			Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	<b>Trw 1 = 1 Laporan</b> <b>Trw 2 = 1 Laporan</b> <b>Trw 3 = 1 Laporan</b> <b>Trw 4 = 1 Laporan</b>	<b>23,135,500</b> <b>60,276,500</b> <b>60,276,500</b> <b>60,276,500</b>	ELPIN JAYA, S.Sos.,MM
			Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terfasilitasinya Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	<b>Tw 1 = 1 Dokumen</b> <b>Tw 2 = 1 Dokumen</b> <b>Tw 3 = 1 Dokumen</b> <b>Tw 4 = 1 Dokumen</b>	<b>89,956,000</b> <b>236,909,500</b> <b>268,342,000</b> <b>327,799,000</b>	ELPIN JAYA, S.Sos.,MM
29								

Liwa, 01 Februari 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN PEKON



Drs. SYA'EKHUDDIN,MM

NIP. 19680913 198909 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN PEKON

Komplek Perkantoran Pemda Way Mengaku, Liwa 34811  
Telepon (0728) 21158

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. SYAEKHUDDIN.,MM  
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon  
Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NUKMAN  
Jabatan : Pj. Bupati Lampung Barat

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

NUKMAN

Liwa, 01 Februari 2024



Pihak Pertama,

Drs. SYAEKHUDDIN.,MM  
NIP. 19680913 198909 1 002

**PERJANJIAN KINERJA  
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON  
Tahun Anggaran : 2024

NO {1}	Sasaran Strategis {2}	Indikator Kinerja {3}	Target {4}
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Pekon Secara Partisipatif	Prosentase Desa Mandiri	39,69%

Program	Anggaran	
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.573.120.630	Dana Alokasi Umum
2 Program Penataan Desa	Rp 1.101.766.600	Dana Alokasi Umum
3 Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Rp 39.459.300	Dana Alokasi Umum
4 Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp 408.612.100	Dana Alokasi Umum
5 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp 638.931.900	Dana Alokasi Umum
<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Rp 4.761.890.530</b>	

  
 Pj Bupati Lampung Barat.  
NIKMAN

Uwa, Februari 2024  
 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat  
 dan Pekon Kabupaten Lampung Barat,  
  
Drs. SYAEKHUDDIN, MM  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19680913 196809 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN PEKON

Komplek Perkantoran Pemda Way Mengaku, Liwa 34811  
Telepon (0728) 21158

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAHRIL, S.Pd.,MM  
Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon  
Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. SYAEKHUDDIN.,MM  
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon  
Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 01 Februari 2024

Pihak Pertama,

SAHRIL, S.Pd.,MM

NIP. 19690406 199103 1 006



Pihak Kedua,

Drs. SYAEKHUDDIN.,MM

NIP. 19680913 198909 1 002



**PERJANJIAN KINERJA  
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah  
Tahun Anggaran


: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON  
: 2024

NO	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
{1}	{2}		{4}
1	Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80%

Program	Anggaran	Keterangan
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp 2.573.120.630,00</b>	
<b>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Rp 33.664.000,00</b>	
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 4.999.800,00	Dana Alokasi Umum
2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 6.825.000,00	Dana Alokasi Umum
3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 5.725.000,00	Dana Alokasi Umum
4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 3.765.000,00	Dana Alokasi Umum
5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp 5.050.200,00	Dana Alokasi Umum
6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 2.299.000,00	Dana Alokasi Umum
7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 5.000.000,00	Dana Alokasi Umum
<b>2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Rp 2.206.753.400,00</b>	
1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 2.199.243.400,00	Dana Alokasi Umum
2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 1.890.200,00	Dana Alokasi Umum
3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Rp 3.110.000,00	Dana Alokasi Umum
4 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp 2.509.800,00	Dana Alokasi Umum

<b>3 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Rp</b>	<b>147.949.400,00</b>	
1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Rp	3.149.000,00	Dana Alokasi Umum
Penyediaan dan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	16.000.000,00	
2 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	32.251.400,00	Dana Alokasi Umum
3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp	5.010.000,00	Dana Alokasi Umum
4 Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp	5.355.000,00	Dana Alokasi Umum
5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	86.184.000,00	Dana Alokasi Umum
<b>4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp</b>	<b>121.822.580,00</b>	
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	6.440.000,00	Dana Alokasi Umum
2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	21.500.000,00	Dana Alokasi Umum
3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	93.882.580,00	Dana Alokasi Umum
<b>5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp</b>	<b>62.931.250,00</b>	
1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	47.750.000,00	Dana Alokasi Umum
2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	5.190.000,00	Dana Alokasi Umum
3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	9.991.250,00	Dana Alokasi Umum

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat  
dan Pekon Kabupaten Lampung Barat,

  
**Drs. SYAEKHUDDIN, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680913 198909 1 002

Liwa, Februari 2024  
Sekretaris Dinas PMP  
Kabupaten Lampung Barat,

  
**SAHRIL, S.Pd., MM**  
Pembina TK.I  
NIP. 19690406 199103 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN PEKON

Komplek Perkantoran Pemda Way Mengaku, Liwa 34811  
Telepon (0728) 21158

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EKA INDRIYANTI, S.IP

Jabatan : Kasubbag Keuangan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kab. Lampung Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SAHRIL, S.Pd.,MM

Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon  
Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 01 Februari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

SAHRIL, S.Pd.,MM

NIP. 19690406 199103 1 006

EKA INDRIYANTI, S.IP

NIP. 19790212 200604 2 023



PERJANJIAN KINERJA  
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah  
Tahun Anggaran

: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON  
: 2024

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
{1}	{2}	{3}	{4}
1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	26 Orang
2	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan
3	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan SKPD	1 Laporan
4	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 2.199.243.400,00	Dana Alokasi Umum
2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 1.890.200	Dana Alokasi Umum
3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Rp 3.110.000	Dana Alokasi Umum
4 Penyusunan Pelaporan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp 2.509.800	Dana Alokasi Umum
<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Rp 2.206.753.400</b>	

Sekretaris Dinas PMP  
Kabupaten Lampung Barat,

  
**SAHRIL, S.Pd., MM**

Pembina TK.I

NIP. 19690406 199103 1 006

Liwa, 01 Februari 2024  
Kasubbag Keuangan  
Dinas PMP Kab. Lampung Barat,

  
**EKA INDRİYANTI, S.IP**

Penata TK.I

NIP. 19790212 200604 2 023



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN PEKON

Komplek Perkantoran Pemda Way Mengaku, Liwa 34811  
Telepon (0728) 21158

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WIJI LESTARI, SE

Jabatan : Kasubbag Umum dan Perencanaan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SAHRIL, S.Pd.,MM

Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon

Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 01 Februari 2024

Pihak Kedua,

SAHRIL, S.Pd.,MM

NIP. 19690406 199103 1 006

Pihak Pertama,

WIJI LESTARI, SE

NIP. 19780908 200212 2 003

**PERJANJIAN KINERJA  
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah  
Tahun Anggaran

: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON  
: 2024

NO	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
{1}	{2}	{3}	{4}
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen
2	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen
3	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen
4	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen
5	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen
6	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan
7	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan
8	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket
9	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan	7 Paket

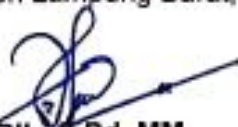


10	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	9 Paket
11	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	4 Dokumen
12	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan
13	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
14	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
15	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan listrik yang di sediakan	1 Laporan
16	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di sediakan	1 Laporan
17	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinanya	9 Unit
18	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipeliharannya	12 Unit
19	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 4.999.800,00	Dana Alokasi Umum
2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 6.825.000,00	Dana Alokasi Umum
3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 5.725.000,00	Dana Alokasi Umum
4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 3.765.000,00	Dana Alokasi Umum

5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp	5.050.200,00	Dana Alokasi Umum
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp	2.299.000,00	Dana Alokasi Umum
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Rp	3.149.000,00	Dana Alokasi Umum
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	16.000.000,00	Dana Alokasi Umum
10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	32.251.400,00	Dana Alokasi Umum
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp	5.010.000,00	Dana Alokasi Umum
12	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp	5.355.000,00	Dana Alokasi Umum
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	86.184.000,00	Dana Alokasi Umum
14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	6.440.000,00	Dana Alokasi Umum
15	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	21.500.000,00	Dana Alokasi Umum
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	93.882.580,00	Dana Alokasi Umum
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	47.750.000,00	Dana Alokasi Umum
18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	5.190.000,00	Dana Alokasi Umum
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	9.991.250,00	Dana Alokasi Umum
<b>Jumlah Anggaran</b>		<b>Rp</b>	<b>366.367.230,00</b>	

Sekretaris Dinas PMP  
Kabupaten Lampung Barat,



**SAHRIL, S.Pd., MM**

Pembina TK.I

NIP. 19690406 199103 1 006

Liwa, 01 Februari 2024  
Kasubbag Umum dan Perencanaan,



**WIJI LESTARI, SE**

Penata TK.I

NIP. 19780908 202012 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN PEKON

Komplek Perkantoran Pemda Way Mengaku, Liwa 34811  
Telepon (0728) 21158

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARLYN SA PARADIPTA PURI, SE

Jabatan : Staff

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : WIJI LESTARI, SE

Jabatan : Kasubbag Umum dan Perencanaan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 01 Februari 2024

Pihak Kedua,

WIJI LESTARI, SE

NIP. 19780908 200212 2 003

Pihak Pertama,

ARLYNSA PARADIPTA PURI, SE

NIP. 19870518 202203 2 003



PERJANJIAN KINERJA  
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah  
Tahun Anggaran

: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON  
: 2024

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
{1}	{2}	{3}	{4}
1	Melaksanakan Administrasi Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
2	Mempersiapkan Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen
3	Membantu Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen
4	Membantu Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen
5	Membantu Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen
6	Membantu Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen
7	Membantu Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan
8	Membantu Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan

Kasubbag Umum dan Perencanaan,

  
**WIJI LESTARI, SE**  
Penata TIK

NIP. 19780908 202012 2 003

Liwa, 01 Februari 2024

  
STAF  
**ARLYNSA PRADIPTA PURI, SE**  
Penata Muda

NIP. 19870518 202203 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN PEKON

Komplek Perkantoran Pemda Way Mengaku, Liwa 34811  
Telepon (0728) 21158

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NOVENTI, SE

Jabatan : Staf

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : EKA INDRIYANTI, S.IP

Jabatan : Kasubbag Keuangan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 01 Februari 2024

Pihak Kedua,

EKA INDRIYANTI, S.IP  
NIP. 19790212 200604 2 023

Pihak Pertama,

NOVENTI, SE  
NIP. 19790405 200701 2 005



PERJANJIAN KINERJA  
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah  
Tahun Anggaran

: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON  
: 2024

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
{1}	{2}	{3}	{4}
1	Membantu Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan
2	Membantu Menyusun Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 Laporan

Kasubbag Keuangan  
Dinas PMP Kab. Lampung Barat,

  
**EKA INDRİYANTI, S.IP**  
Penata TK.I  
NIP. 19790212 200604 2 023

Liwa, 0/Februari 2024

Staf

  
**NOVENTI, SE**  
Penata Muda  
NIP. 19790405 200701 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN PEKON

Komplek Perkantoran Pemda Way Mengaku, Liwa 34811  
Telepon (0728) 21158

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PARAMITA ULI, SE

Jabatan : Staf

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : EKA INDRIYANTI, S.IP

Jabatan : Kasubbag Keuangan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 01 Februari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

EKA INDRIYANTI, S.IP  
NIP. 19790212 200604 2 023

PARAMITA ULI, SE  
NIP. 19910312 202012 2 008

PERJANJIAN KINERJA  
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah  
Tahun Anggaran

: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON  
: 2024

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
{1}	{2}	{3}	{4}
1	Membantu Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	4 Dokumen
2	Membantu Menyusun Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang tersusun	1 Dokumen
3	Membantu Menyusun Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen

Kasubbag Keuangan  
Dinas PMP Kab. Lampung Barat,


  
**EKA INDRIYANTI, S.IP**

Penata TK.I

NIP. 19790212 200604 2 023

Liwa, 0/Februari 2024

Staf

  
**PARAMITA ULI, SE**

Penata Muda

NIP. 19910312 202012 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN PEKON

Komplek Perkantoran Pemda Way Mengaku, Liwa 34811  
Telepon (0728) 21158

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DESMON IRAWAN, ST

Jabatan : Kabid Penataan dan Kerja Sama Pekon

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. SYAEKHUDDIN.,MM

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon

Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 01 Februari 2024

Pihak Pertama,

DESMON IRAWAN, ST

NIP. 19731225 200312 1 004

Pihak Kedua,

Drs. SYAEKHUDDIN.,MM  
NIP. 19680913 198909 1 002


**PERJANJIAN KINERJA  
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah  
Tahun Anggaran

: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON  
: 2024

NO	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
{1}	{2}	{3}	{4}
1	Meningkatnya Penataan Pekon	Persentase Desa yang Memenuhi Syarat Penataan Desa yang ditata	100%
2	Meningkatnya Kerja Sama Antar Pekon Untuk Meningkatkan Ekonomi	Persentase Peningkatan Kerja Sama Antar Pekon untuk meningkatkan Ekonomi Masyarakat	2,29%

Program Penataan Desa	Anggaran	Keterangan
<b>1 Program Penataan Desa</b>		
1 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Rp 1.101.766.600	Dana Alokasi Umum
<b>2 Program Peningkatan Kerja Sama Desa</b>		
1 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Rp 39.459.300	Dana Alokasi Umum
<b>3 Program Administrasi Pemerintahan Desa</b>		
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	Rp 112.768.600	Dana Alokasi Umum
<b>Jumlah</b>	Rp 1.253.994.500	

  
 Kepala Dinas PMP  
 Kabupaten Lampung Barat,  
  
**Drs. SYAPKHUDDIN, MM**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19680913 198909 1 002

Lwa, 07 Februari 2024  
 Kabid Penataan dan Kerja Sama Pekon,  
  
**DESMON IRAWAN, ST**  
 Pembina  
 NIP. 19731225 200312 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN PEKON

Komplek Perkantoran Pemda Way Mengaku, Liwa 34811  
Telepon (0728) 21158

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LUSY DIAN IRVETA, S.A.N

Jabatan : Staf

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : EDWIN OKTA FERNANDES, S.Sos..MM

Jabatan : Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 01 Februari 2024

Pihak Kedua

EDWIN OKTA FERNANDES, S.Sos..MM

NIP. 19791013 201101 1 002

Pihak Pertama,

LUSY DIAN IRVETA, S.A.N

NIP. 19920712 202203 2 008



PERJANJIAN KINERJA  
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah  
Tahun Anggaran

: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON  
: 2024

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
{1}	{2}	{3}	{4}
1	Membantu Menyiapkan Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen
2	Membantu Terlaksananya Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen

Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda,

  
**EDWIN OKTA FERNANDES, S.Sos.,MM**  
Penata  
NIP. 19791013 201101 1 002

Liwa, 01 Februari 2024

Staf  
  
**LUSY DIAN IRVETA, S.A.N**  
Penata Muda  
NIP. 19920712 202203 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN PEKON

Komplek Perkantoran Pemda Way Mengaku, Liwa 34811  
Telepon (0728) 21158

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NICKO TAMPANI ANHAR, SKM

Jabatan : Staf

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ELISA, SE

Jabatan : Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 01 Februari 2024

Pihak Kedua,

ELISA, SE

NIP. 19830516 201001 2 004

Pihak Pertama,

NICKO TAMPANI ANHAR, SKM

NIP. 19930418 202203 1 003



PERJANJIAN KINERJA  
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah  
Tahun Anggaran

: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON  
: 2024

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
{1}	{2}	{3}	{4}
1	Membantu Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	1 Unit
2	Membantu Terlaksananya Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen

Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda,



ELISA, SE

Penata

NIP. 19830516 201001 2 004

Liwa, 07 Februari 2024  
Staf



NICKO TAMPANI ANHAR, SKM

Penata Muda

NIP. 19930418 202203 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN PEKON

Komplek Perkantoran Pemda Way Mengaku, Liwa 34811  
Telepon (0728) 21158

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EDWIN OKTA FERNANDES, S.Sos.,MM  
Jabatan : Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DESMON IRAWAN, ST  
Jabatan : Kabid Penataan dan Kerja Sama Pekon Dinas Pemberdayaan  
Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 01 Februari 2024

Pihak Kedua,

DESMON IRAWAN, ST  
NIP. 19731225 200312 1 004

Pihak Pertama,

EDWIN OKTA FERNANDES, S.Sos.,MM  
NIP. 19791013 201101 1 002

**PERJANJIAN KINERJA  
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah  
Tahun Anggaran

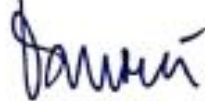
: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON  
: 2024

NO	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
{1}	{2}	{3}	{4}
1	Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	1 Unit

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Rp 1.101.766.600	Dana Alokasi Umum

Liwa, 01 Februari 2024

Kabid Penataan dan Kerja Sama Pekon,



**DESMON IRAWAN, ST**

Pembina  
NIP. 19731225 200312 1 004

Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda,



**EDWIN OKTA FERNANDES, S.Sos., MM**

Penata  
NIP. 19791013 201101 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN PEKON

Komplek Perkantoran Pemda Way Mengaku, Liwa 34811  
Telepon (0728) 21158

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ELISA, SE

Jabatan : Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DESMON IRAWAN, ST

Jabatan : Kabid Penataan dan Kerja Sama Pekon

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 01 Februari 2024

Pihak Kedua,

DESMON IRAWAN, ST  
NIP. 19731225 200312 1 004

Pihak Pertama,

ELISA, SE  
NIP. 19830516 201001 2 004

PERJANJIAN KINERJA  
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah  
Tahun Anggaran

: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON  
: 2024

NO	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
{1}	{2}	{3}	{4}
1	Terlaksananya Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen
2	Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Rp 39.459.300	Dana Alokasi Umum
2 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	Rp 112.768.600	Dana Alokasi Umum
	Rp 152.227.900	

Liwa, 01 Februari 2024

Kabid Penataan dan Kerja Sama Pekon,

**DESMON IRAWAN, ST**  
Pembina  
NIP. 19731225 200312 1 004

Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda,

**ELISA, SE**  
Penata  
NIP. 19830516 201001 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN PEKON

Komplek Perkantoran Pemda Way Mengaku, Liwa 34811  
Telepon (0728) 21158

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FAUZAN ARIADI, SE.,MM  
Jabatan : Kabid Pemerintahan Pekon Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon  
Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. SYAEKHUDDIN.,MM  
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon  
Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 01 Februari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

  
Drs. SYAEKHUDDIN.,MM  
NIP. 19680913 198909 1 002

  
FAUZAN ARIADI, SE.,MM  
NIP. 19800217 200804 1 001

**PERJANJIAN KINERJA  
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**


Perangkat Daerah  
Tahun Anggaran

: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON  
: 2024

NO	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
{1}	{2}	{3}	{4}
1	Meningkatnya Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Pekon Tertib Administrasi	100%


	Anggaran	Keterangan
<b>1 Program Administrasi Pemerintahan Desa</b>		
1 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		
1 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Rp 59.188.500	Dana Alokasi Umum
2 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Rp 47.585.500	Dana Alokasi Umum
3 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Rp 56.983.000	Dana Alokasi Umum
4 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Rp 43.585.500	Dana Alokasi Umum
5 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Rp 49.236.000	Dana Alokasi Umum
<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Rp 256.588.500</b>	

Kepala Dinas PMP  
Kabupaten Lampung Barat,

  
**Drs. SYAEKHUDDIN.MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680913 198909 1 002

Liwa, 07 Februari 2024

Kabid Pemerintahan Pekon,

  
**FAUZAN ARIADI, SE.,MM**  
Pembina  
NIP. 19800217 200804 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN PEKON

Komplek Perkantoran Pemda Way Mengaku, Liwa 34811  
Telepon (0720) 21158

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURANTORO, A.Md

Jabatan : Staf

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : JONIYANSAH, S.IP

Jabatan : Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

JONIYANSAH, S.IP

NIP. 19740610 200701 1 013

Liwa, b) Februari 2024

Pihak Pertama,

NURANTORO, A.Md

NIP. 19710225 200003 1 002



PERJANJIAN KINERJA  
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah  
Tahun Anggaran

: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON  
: 2024

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
{1}	{2}	{3}	{4}
1	Membantu Menyiapkan Bahan Pembinaan LHP	Jumlah Bahan Pembinaan LHP	1 Dokumen
2	Membantu Menyiapkan Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah Bahan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pekon	1 Dokumen

Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda,




**JONIYANSAH, S.IP**

Penata

NIP. 19740610 200701 1 013

Liwa, 01 Februari 2024

Staf



**NURANTORO, A.Md**

Penata TK.I

NIP. 19710225 200003 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN PEKON

Komplek Perkantoran Pomda Way Mengaku, Liwa 34811  
Telepon (0728) 21158

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EKTA FRANSISKA, SE

Jabatan : Staf

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : JONIYANSAH, S.IP

Jabatan : Penggerak Swadaya Masyarakat Masyarakat Ahli Muda

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 01 Februari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



JONIYANSAH, S.IP  
NIP. 19740610 200701 1 013



EKTA FRANSISKA, SE  
NIP. 19930927 201903 2 001

PERJANJIAN KINERJA  
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah  
Tahun Anggaran

: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON  
: 2024

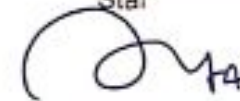
NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
{1}	{2}	{3}	{4}
1	Membantu menyiapkan Dokumen terkait Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yang disusun	1 Dokumen
2	Membantu Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Laporan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1 Laporan

Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda,



**JONIYANSAH, S.IP**  
Penata  
NIP. 19740610 200701 1 013

Liwa, 01 Februari 2024  
Staf



**EKTA FRANSISKA, SE**  
Penata Muda  
NIP. 19930927 201903 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN PEKON

Komplek Perkantoran Pemda Way Mengaku, Liwa 34811  
Telepon (0728) 21158

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : OKI INDRA SURYATAMA, A.Md

Jabatan : Staf

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : JONIYANSAH, S.IP

Jabatan : Penggerak Swadaya Masyarakat Masyarakat Ahli Muda

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 01 Februari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

  
JONIYANSAH, S.IP  
NIP. 19740610 200701 1 013

  
OKI INDRA SURYATAMA, A.Md  
NIP. 19891031 202012 1 005

PERJANJIAN KINERJA  
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah  
Tahun Anggaran

: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON  
: 2024

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
{1}	{2}	{3}	{4}
1	Membantu menyiapkan Dokumen terkait Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yang disusun	1 Dokumen
2	Membantu Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Laporan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1 Laporan

Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda,



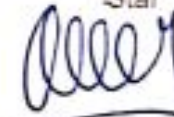
JONIYANSAH, S.IP

Penata

NIP. 19740610 200701 1 013

Lwa, 01 Februari 2024

Staf



OKI INDRA SURYATAMA, A.Md

Pengatur

NIP. 19891031 202012 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN PEKON

Komplek Perkantoran Pemda Way Mengaku, Liwa 34811  
Telepon (0728) 21158

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WAWAN AMAMI, A.Md

Jabatan : Staf

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : JONIYANSAH, S.IP

Jabatan : Penggerak Swadaya Masyarakat Masyarakat Ahli Muda

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut pihak kedua

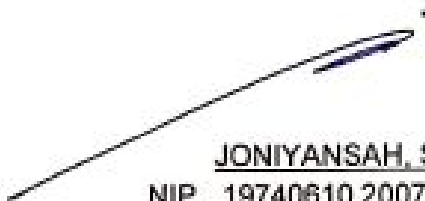
Pihak pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 01 Februari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

  
JONIYANSAH, S.IP  
NIP. 19740610 200701 1 013

  
WAWAN AMAMI, A.Md  
NIP. 19870826 202012 1 004



**PERJANJIAN KINERJA  
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah  
Tahun Anggaran

: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON  
: 2024

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
{1}	{2}	{3}	{4}
1	Membantu Menyiapkan Bahan Pembinaan LHP	Jumlah Bahan Pembinaan LHP	1 Dokumen
2	Membantu Menyiapkan Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah Bahan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pekon	1 Dokumen

Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda,



**JONIYANSAH, S.IP**

Penata

NIP. 19740610 200701 1 013

Liwa, 07 Februari 2024  
Staf



**WAWAN AMAMI, A.Md**

Pengatur

NIP. 19870826 202012 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN PEKON

Komplek Perkantoran Pemda Way Mengaku, Liwa 34811  
Telepon (0728) 21158

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JONIYANSAH, S.IP

Jabatan : Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : FAUZAN ARIADI, SE.,MM

Jabatan : Kabid Pemerintahan Pekon

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 01 Februari 2024

Pihak Kedua,

FAUZAN ARIADI, SE.,MM  
NIP. 19800217 200804 1 001

Pihak Pertama,

JONIYANSAH, S.IP  
NIP. 19740610 200701 1 013



**PERJANJIAN KINERJA  
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**


Perangkat Daerah  
Tahun Anggaran

: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON  
: 2024

NO	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
{1}	{2}	{3}	{4}
1	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	2 Dokumen
2	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Rp 59.188.500	Dana Alokasi Umum
2 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Rp 47.585.500	Dana Alokasi Umum
<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Rp 106.774.000</b>	

Kabid Pemerintahan Pekon,  
  
**FAUZAN ARIADI, SE.,MM**  
 Pembina  
 NIP. 19800217 200804 1 001

Liwa, 01 Februari 2024  
 Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda,  
  
**JONIYANSAH, S.IP**  
 Penata  
 NIP. 19740610 200701 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN PEKON

Komplek Perkantoran Pemda Way Mengaku, Liwa 34811  
Telepon (0728) 21158

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DELLA DAMAYANTI HERNAWAN, S.Psi

Jabatan : Staf

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : JONIYANSAH, S.IP

Jabatan : Penggerak Swadaya Masyarakat Masyarakat Ahli Muda

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 01 Februari 2024

Pihak Kedua,

JONIYANSAH, S.IP  
NIP. 19740610 200701 1 013

Pihak Pertama,

DELLA DAMAYANTI HERNAWAN, S.Psi  
NIP. 19960701 202203 2 006

PERJANJIAN KINERJA  
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah  
Tahun Anggaran

: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON  
: 2024

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
{1}	{2}	{3}	{4}
1	Membantu Terlaksananya Fasilitasi Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen
2	Membantu Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	2 Dokumen

Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda,



JONIYANSAH, S.IP

Penata

NIP. 19740610 200701 1 013

Liwa, 09 Februari 2024

Staf



DELLA DAMAYANTI HERNAWAN, S.Psi

Penata Muda

NIP. 19960701 202203 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN PEKON

Komplek Perkantoran Pemda Way Mengaku, Liwa 34811  
Telepon (0728) 21158

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TIAR SUKMADI, SE

Jabatan : Staf

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : JONIYANSAH, S.IP

Jabatan : Penggerak Swadaya Masyarakat Masyarakat Ahli Muda

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 01 Februari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



JONIYANSAH, S.IP  
NIP. 19740610 200701 1 013



TIAR SUKMADI  
NIP. 19970112 202203 1 004


**PERJANJIAN KINERJA  
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah  
Tahun Anggaran

: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON  
: 2024

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
{1}	{2}	{3}	{4}
1	Membantu Terlaksananya Fasilitasi Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen
2	Membantu Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	2 Dokumen

Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda,



**JONIYANSAH, S.IP**

Penata

NIP. 19740610 200701 1 013

Liwa, 01 Februari 2024

Staf



**TIAR SUKMADI, SE**

Penata Muda

NIP. 19970112 202203 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN PEKON

Komplek Perkantoran Pemda Way Mengaku, Liwa 34811  
Telepon (0728) 21158

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ELPIN JAYA, S.Sos.,MM  
Jabatan : Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Pekon  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kab. Lampung Barat


Selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : Drs. SYAEKHUDDIN.,MM  
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon  
Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

  
Pihak Kedua,  
Drs. SYAEKHUDDIN.,MM  
NIP. 19680913 198909 1 002

Liwa, 01 Februari 2024  
Pihak Pertama,  
  
ELPIN JAYA, S.Sos.,MM  
NIP. 19790906 200604 1 007



PERJANJIAN KINERJA  
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

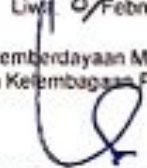
Perangkat Daerah  
Tahun Anggaran

: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON  
: 2024

(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persenilase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	100%

Program	Anggaran	Keterangan
<b>1 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat</b>		Dana Alokasi Umum
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota		
1 Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Rp 51.289.500	Dana Alokasi Umum
2 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Rp 149.576.500	Dana Alokasi Umum
3 Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Rp 49.960.000	Dana Alokasi Umum
4 Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Rp 60.276.500	Dana Alokasi Umum
5 Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Rp 327.799.000	Dana Alokasi Umum
<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Rp 638.931.900</b>	
<b>2 Program Administrasi Pemerintahan Desa</b>		
1 Pembinaan dan Pemberdayaan Bumdesa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Rp 39.255.000	Dana Alokasi Umum
<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Rp 39.255.000</b>	
<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Rp 678.186.900</b>	

  
 Kepala Dinas PMP  
 Kabupaten Lampung Barat,  
  
**Drs. SYAEKHUDDIN, MM**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19680613 198909 1 002

Liris 07 Februari 2024  
 Kabid Pemberdayaan Masyarakat  
 dan Kelembagaan Pekon,  
  
**ELPIN JAYA, S.Sos, MM**  
 Penata  
 NIP. 19790908 200604 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN PEKON

Komplek Perkantoran Pemda Way Mengaku, Liwa 34811  
Telepon (0728) 21158

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : GUNAWAN, S.IP  
Jabatan : Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kab. Lampung Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ELPIN JAYA, S.Sos.,MM  
Jabatan : Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Pekon  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kab. Lampung Barat

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 01 Februari 2024

Pihak Kedua,

ELPIN JAYA, S.Sos.,MM  
NIP. 19790906 200604 1 007

Pihak Pertama,

GUNAWAN, S.IP  
NIP. 19800227 201001 1 002



PERJANJIAN KINERJA  
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH


Perangkat Daerah  
Tahun Anggaran

: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON  
: 2024

NO	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
{1}	{2}	{3}	{4}
1	Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Rp 60.276.500	Dana Alokasi Umum
<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Rp 60.276.500</b>	

Kabid Pemberdayaan Masyarakat  
dan Kelembagaan Pekon,

  
ELPIN JAYA, S.Sos.,MM

Penata

NIP. 19790906 200604 1 007

Liwa, 07 Februari 2024  
Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda,



GUNAWAN, S.IP

Penata

NIP. 19800227 201001 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN PEKON

Komplek Perkantoran Pemda Way Mengaku, Liwa 34811  
Telepon (0728) 21158

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NOVA CHRISTINA, S.IP.,M.Si  
Jabatan : Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kab. Lampung Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ELPIN JAYA, S.Sos.,MM  
Jabatan : Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Pekon  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kab. Lampung Barat

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

ELPIN JAYA, S.Sos.,MM  
NIP. 19790906 200604 1 007

Liwa, 01 Februari 2024

Pihak Pertama,

NOVA CHRISTINA, S.IP.,M.Si  
NIP. 19931112 201507 2 001

**PERJANJIAN KINERJA  
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

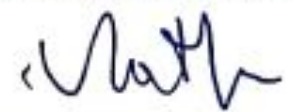
Perangkat Daerah  
Tahun Anggaran

: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON  
: 2024

NO	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
{1}	{2}	{3}	{4}
1	Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM,dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM,dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2 Dokumen
2	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga
3	Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM,dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Rp 51.289.500	Dana Alokasi Umum
2 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Rp 149.576.900	Dana Alokasi Umum
3 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Rp 327.799.000	Dana Alokasi Umum
<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Rp 528.665.400</b>	

Kabid Pemberdayaan Masyarakat  
dan Kelembagaan Pekon,  
  
**ELPIN JAYA, S.Sos.,MM**  
Penata  
NIP. 19790906 200604 1 007

Liwa, 01 Februari 2024  
Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda,  
  
**NOVA CHRISTINA, S.IP.,M.SI**  
Penata  
NIP. 19931112 201507 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN PEKON

Komplek Perkantoran Pemda Way Mengaku, Liwa 34811  
Telepon (0728) 21158

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIA AKFRIA JULIA NASIR, S. STP  
Jabatan : Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kab. Lampung Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ELPIN JAYA, S.Sos.,MM  
Jabatan : Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Pekon  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kab. Lampung Barat

Selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  


ELPIN JAYA, S.Sos.,MM  
NIP. 19790906 200604 1 007

Liwa, 01 Februari 2024

Pihak Pertama,  


RIA AKFRIA JULIA NASIR, S. STP  
NIP. 19850221 200312 2 002

PERJANJIAN KINERJA  
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah  
Tahun Anggaran

: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON  
: 2024

NO	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
{1}	{2}	{3}	{4}
1	Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan
2	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa	1 Dokumen

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Rp 49.990.000	Dana Alokasi Umum
2. Pembinaan dan Pemberdayaan Bumdesa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Rp 39.255.000	Dana Alokasi Umum
<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Rp 89.245.000</b>	

Kabid Pemberdayaan Masyarakat  
dan Kelembagaan Pekon,

  
**ELPIN JAYA, S.Sos.,MM**

Penata

NIP. 19790906 200604 1 007

Liwa, 07 Februari 2024  
Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda,

  
**RIA AKFRIA JULIA NASIR, S.STP**

Penata TK.I

NIP. 19850221 200312 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN PEKON

Komplek Perkantoran Pemda Way Mengaku, Liwa 34811  
Telepon (0728) 21158

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUSI ELWIDA, SE

Jabatan : Staf

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NOVA CHRISTINA, S.IP.,M.Si

Jabatan : Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 01 Februari 2024

Pihak Kedua,

NOVA CHRISTINA, S.IP.,M.Si  
NIP. 19931112 201507 2 001

Pihak Pertama,

SUSI ELWIDA, SE  
NIP. 19910312 202012 2 008



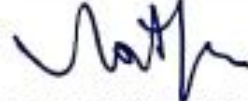
PERJANJIAN KINERJA  
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah  
Tahun Anggaran

: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON  
: 2024

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
{1}	{2}	{3}	{4}
1	Membantu Menyiapkan Bahan Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM,dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Banyaknya Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM,dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2 Dokumen
2	Membantu Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Banyaknya Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	4 Lembaga
3	Membantu Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Banyaknya Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen

Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda,



**NOVA CHRISTINA, S.IP.,M.SI**

Penata

NIP. 19931112 201507 2 001

Liwa, 9 Februari 2024  
staf



**SUSI ELWIDA, SE**

Penata Muda

NIP. 1983115 201001 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN PEKON

Komplek Perkantoran Pemda Way Mengaku, Liwa 34811  
Telepon (0728) 21158

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TOADDIN, S.Sos

Jabatan : Staf

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RIA AKFRIAJULIA NASIR, S.STP

Jabatan : Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 01 Februari 2024

Pihak Kedua,

RIA AKFRIAJULIA NASIR, S.STP  
NIP. 19850221 200312 2 002

Pihak Pertama,

TOADDIN, S.Sos  
NIP. 19910312 202012 2 008



PERJANJIAN KINERJA  
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah  
Tahun Anggaran

: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON  
: 2024

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
{1}	{2}	{3}	{4}
1	Membantu Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan

Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda,

**RIA AKFRIAJULIA NASIR, S.STP**

Penata TK.I

NIP. 19850221 200312 2 002

Liwa, 07 Februari 2024  
Staf

**TOADDIN, S.Sos**

Penata TK.I

NIP. 19710515 200903 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN PEKON

Komplek Perkantoran Ponda Way Mengaku, Liwa 34811  
Telepon (0728) 21158

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MAR'ATUS SHOLEHA, S.Sos

Jabatan : Staf

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : GUNAWAN, S.IP

Jabatan : Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 01 Februari 2024

Pihak Kedua,

GUNAWAN, S.IP

NIP. 19800227 201001 1 002

Pihak Pertama,

MAR'ATUS SHOLEHA, S.Sos

NIP. 19970803 202012 2 017

PERJANJIAN KINERJA  
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah  
Tahun Anggaran

: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON  
: 2024

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
{1}	{2}	{3}	{4}
1	Membantu terlaksananya Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan

Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda,



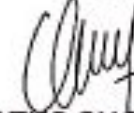
**GUNAWAN, S.IP**

Penata

NIP. 19800227 201001 1 002

Liwa, 01 Februari 2024

Staf



**MAR'ATUS SHOLEHA, S.Sos**

Penata Muda

NIP. 19970803 202012 2 017



**SALINAN**

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI  
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 400 TAHUN 2024

TENTANG

STATUS KEMAJUAN DAN KEMANDIRIAN DESA TAHUN 2024

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

- menimbang : a. bahwa untuk mengukur tingkat perkembangan kemajuan dan kemandirian desa pada tahun 2024, perlu menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa berdasarkan pemutakhiran data indeks desa membangun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2024;
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN PEMERINTAHAN PEKON

Jalan Tulp Nomor 03 Telp (0728) 21158  
LIWA 34573

BERITA ACARA  
PENETAPAN STATUS DESA

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Lima Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat  
Bertempat di :

1 Kabupaten : LAMPUNG BARAT  
2 Provinsi : LAMPUNG

Telah dilakukan Verifikasi di Tingkat Kabupaten hasil pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM)  
Tahun 2024 sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengukuran status perkembangan  
desa IDM Tahun 2024 dengan hasil sebagai terlampir,

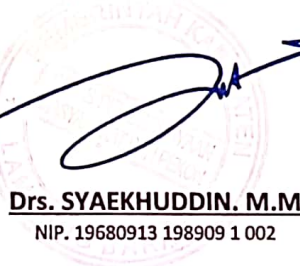
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disahkan Team Verifikasi

a.n. Kepala Bappeda  
Sekretaris Bappeda  
Kabupaten Lampung Barat

Kepala DPMP  
Kabupaten Lampung Barat

Koordinator TPP  
Kabupaten Lampung Barat





**REKAPITULASI INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) TAHUN 2024  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG**

NO	KODE PROV	NAMA PROVINSI	KODE KAB	NAMA KABUPATEN	KODE KEC	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IKS 2024	IKE 2024	IKL 2024	NILAI IDM 2024	STATUS IDM 2024
1	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180404	BALIK BUKIT	1804042002	KUBU PERAHU	0,9371	0,8667	0,8667	0,8902	MANDIRI
2	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180404	BALIK BUKIT	1804042004	PADANG CAHYA	0,9029	0,7833	0,8	0,8287	MANDIRI
3	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180404	BALIK BUKIT	1804042005	SEBARUS	0,9257	0,7167	0,8667	0,8363	MANDIRI
4	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180404	BALIK BUKIT	1804042006	WAY EMPULAU ULU	0,9029	0,6	0,8667	0,7898	MAJU
5	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180404	BALIK BUKIT	1804042007	GUNUNG SUGIH	0,8971	0,6833	0,8667	0,8157	MANDIRI
6	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180404	BALIK BUKIT	1804042008	WATES	0,8914	0,7167	0,8667	0,8249	MANDIRI
7	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180404	BALIK BUKIT	1804042009	PADANG DALOM	0,8457	0,7667	0,8667	0,8263	MANDIRI
8	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180404	BALIK BUKIT	1804042010	SUKARAME	0,7886	0,6833	0,8667	0,7795	MAJU
9	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180404	BALIK BUKIT	1804042011	BAHWAY	0,7829	0,5833	0,8667	0,7443	MAJU
10	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180404	BALIK BUKIT	1804042012	SEDAMPAH INDAH	0,84	0,6	0,9333	0,7911	MAJU
11	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180405	SUMBER JAYA	1804052001	SIMPANGSARI	0,8514	0,6833	0,9333	0,8227	MANDIRI
12	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180405	SUMBER JAYA	1804052010	SUKAJAYA	0,9086	0,65	0,6667	0,7417	MAJU
13	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180405	SUMBER JAYA	1804052011	SINDANG PAGAR	0,8057	0,6667	0,8667	0,7797	MAJU
14	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180405	SUMBER JAYA	1804052012	SUKAPURA	0,9143	0,7167	0,9333	0,8548	MANDIRI
15	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180405	SUMBER JAYA	1804052013	WAY PETAI	0,88	0,8167	1	0,8989	MANDIRI
16	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180406	BELALAU	1804062001	KENALI	0,9543	0,8	0,8667	0,8737	MANDIRI
17	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180406	BELALAU	1804062002	KEJADIAN	0,76	0,8	1	0,8533	MANDIRI

18	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180406	BELALAU	1804062003	BUMI AGUNG	0,8171	0,6833	0,6667	0,7224	MAJU
19	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180406	BELALAU	1804062004	TURGAK	0,8457	0,75	0,6	0,7319	MAJU
20	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180406	BELALAU	1804062005	BEDUDU	0,8229	0,7833	0,7333	0,7798	MAJU
21	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180406	BELALAU	1804062006	SUKARAME	0,8171	0,7167	0,8	0,7779	MAJU
22	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180406	BELALAU	1804062007	HUJUNG	0,9314	0,8667	0,8667	0,8883	MANDIRI
23	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180406	BELALAU	1804062013	SERUNGKUK	0,7486	0,5333	1	0,7606	MAJU
24	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180406	BELALAU	1804062019	SUKA MAKMUR	0,8114	0,5167	0,9333	0,7538	MAJU
25	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180406	BELALAU	1804062020	FAJAR AGUNG	0,7886	0,6167	0,9333	0,7795	MAJU
26	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180407	WAY TENONG	1804072002	PURALAKSANA	0,9971	0,7833	0,9333	0,8846	MANDIRI
27	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180407	WAY TENONG	1804072003	KARANG AGUNG	0,8743	0,9333	0,8667	0,8914	MANDIRI
28	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180407	WAY TENONG	1804072004	MUTAR ALAM	0,96	0,75	0,8	0,8367	MANDIRI
29	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180407	WAY TENONG	1804072005	TANUNGRAYA	0,8343	0,7	0,9333	0,8225	MANDIRI
30	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180407	WAY TENONG	1804072006	SUKANANTI	0,8343	0,75	0,8667	0,817	MANDIRI
31	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180407	WAY TENONG	1804072007	SUKARAJA	0,8914	0,7	0,9333	0,8416	MANDIRI
32	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180407	WAY TENONG	1804072008	PADANG TAMBAK	0,84	0,6	0,8667	0,7689	MAJU
33	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180407	WAY TENONG	1804072009	TAMBAK JAWA	0,9086	0,7667	0,8667	0,8473	MANDIRI
34	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180408	SEKINCAU	1804082001	PAMPANGAN	0,9086	0,7333	0,9333	0,8584	MANDIRI
35	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180408	SEKINCAU	1804082006	WASPADA	0,8686	0,6333	1	0,834	MANDIRI
36	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180408	SEKINCAU	1804082007	TIGAJAYA	0,8514	0,6	0,8667	0,7727	MAJU
37	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180408	SEKINCAU	1804082008	GIHAM SUKANMAJU	0,9486	0,8167	0,9333	0,8995	MANDIRI
38	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180409	SUOH	1804092003	SUKA MARGA	0,88	0,65	0,9333	0,8211	MANDIRI



39	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180409	SUOH	1804092004	SUMBER AGUNG	0,8286	0,7	0,9333	0,8206	MANDIRI
40	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180409	SUOH	1804092005	TUGU RATU	0,9429	0,7167	0,9333	0,8643	MANDIRI
41	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180409	SUOH	1804092006	BANDING AGUNG	0,9086	0,6333	1	0,8473	MANDIRI
42	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180409	SUOH	1804092010	ROWO REJO	0,88	0,5667	0,9333	0,7933	MAJU
43	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180409	SUOH	1804092017	SIDO REJO	0,7029	0,5	0,8667	0,6898	BERKEMBANG
44	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180409	SUOH	1804092018	RINGIN SARI	0,8457	0,6833	1	0,843	MANDIRI
45	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180410	BATU BRAK	1804102001	KEMBAHANG	0,8286	0,7167	0,8667	0,804	MAJU
46	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180410	BATU BRAK	1804102002	NEGERI RATU	0,8	0,6333	0,7333	0,7222	MAJU
47	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180410	BATU BRAK	1804102003	KEGERINGAN	0,9314	0,6	0,8667	0,7994	MAJU
48	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180410	BATU BRAK	1804102004	GUNUNG SUGIH	0,6914	0,5833	0,6	0,6249	BERKEMBANG
49	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180410	BATU BRAK	1804102005	PEKON BALAK	0,88	0,8167	0,8667	0,8544	MANDIRI
50	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180410	BATU BRAK	1804102006	SUKABUMI	0,8743	0,5833	0,8667	0,7748	MAJU
51	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180410	BATU BRAK	1804102007	CANGGU	0,8629	0,5333	0,8	0,7321	MAJU
52	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180410	BATU BRAK	1804102008	KOTABESI	0,7771	0,7167	0,8667	0,7868	MAJU
53	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180410	BATU BRAK	1804102009	SUKARAJA	0,6971	0,4	0,9333	0,6768	BERKEMBANG
54	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180410	BATU BRAK	1804102010	KERANG	0,7086	0,6	0,7333	0,6806	BERKEMBANG
55	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180410	BATU BRAK	1804102011	TEBA LIOKH	0,8	0,6333	0,6	0,6778	BERKEMBANG
56	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180411	SUKAU	1804112001	TANJUNG RAYYA	0,8743	0,7667	0,9333	0,8581	MANDIRI
57	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180411	SUKAU	1804112002	HANAKAU	0,84	0,75	0,8667	0,8189	MANDIRI
58	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180411	SUKAU	1804112003	BUAY NYERUPA	0,7943	0,7	0,7333	0,7425	MAJU
59	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180411	SUKAU	1804112004	TAPAK SIRING	0,8571	0,6833	0,6	0,7135	MAJU

60	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180411	SUKAU	1804112005	JAGA RAGA	0,8629	0,7	0,8667	0,8098	MAJU
61	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180411	SUKAU	1804112009	PAGAR DEWA	0,8114	0,7667	0,9333	0,8371	MANDIRI
62	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180411	SUKAU	1804112012	SUKA MULYA	0,7143	0,5167	0,8667	0,6992	BERKEMBANG
63	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180411	SUKAU	1804112018	BANDAR BARU	0,8057	0,65	0,8667	0,7741	MAJU
64	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180411	SUKAU	1804112019	BUMI JAYA	0,7543	0,5	0,8667	0,707	BERKEMBANG
65	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180411	SUKAU	1804112020	TEBA PERING JAYA	0,8114	0,6	0,8667	0,7594	MAJU
66	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180415	GEDUNG SURIAN	1804152001	GEDUNG SURIAN	0,9543	0,6	0,9333	0,8292	MANDIRI
67	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180415	GEDUNG SURIAN	1804152002	PURAMEKAR	0,9086	0,8333	0,9333	0,8917	MANDIRI
68	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180415	GEDUNG SURIAN	1804152003	CIPTAWARAS	0,9429	0,7333	0,9333	0,8698	MANDIRI
69	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180415	GEDUNG SURIAN	1804152004	TRIMULYO	0,8743	0,8833	1	0,9192	MANDIRI
70	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180415	GEDUNG SURIAN	1804152005	MEKARAJAYA	0,88	0,6	0,9333	0,8044	MAJU
71	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180418	KEBUN TEBU	1804182001	PURA JAYA	0,8571	0,8833	0,9333	0,8913	MANDIRI
72	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180418	KEBUN TEBU	1804182002	PURA WIWITAN	0,88	0,7	1	0,86	MANDIRI
73	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180418	KEBUN TEBU	1804182003	TRIBUDI SYUKUR	0,88	0,6833	0,9333	0,8322	MANDIRI
74	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180418	KEBUN TEBU	1804182004	MURARA JAYA I	0,8286	0,6833	1	0,8373	MANDIRI
75	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180418	KEBUN TEBU	1804182005	MURARA JAYA II	0,9257	0,9	0,9333	0,9197	MANDIRI
76	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180418	KEBUN TEBU	1804182006	TRI BUDI MAKMUR	0,8114	0,6333	1	0,8149	MAJU
77	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180418	KEBUN TEBU	1804182007	TUGU MULYA	0,8057	0,5667	0,8667	0,7463	MAJU
78	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180418	KEBUN TEBU	1804182008	CIPTA MULYA	0,8457	0,5167	0,9333	0,7652	MAJU
79	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180418	KEBUN TEBU	1804182009	MURARA BARU	0,8171	0,6667	1	0,8279	MANDIRI
80	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180418	KEBUN TEBU	1804182010	SINAR LUAS	0,7829	0,5833	0,8667	0,7443	MAJU



81	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180419	AIR HITAM	1804192001	SIDODADI	0,8971	0,7333	1	0,8768	MANDIRI
82	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180419	AIR HITAM	1804192002	SEMARANG JAYA	0,9257	0,7333	1	0,8863	MANDIRI
83	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180419	AIR HITAM	1804192003	SUMBER ALAM	0,9257	0,7667	1	0,8975	MANDIRI
84	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180419	AIR HITAM	1804192004	GUNUNGTERANG	0,8857	0,75	1	0,8786	MANDIRI
85	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180419	AIR HITAM	1804192005	SUKA JADI	0,7771	0,55	1	0,7757	MAJU
86	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180419	AIR HITAM	1804192006	SRI MENANTI	0,88	0,75	1	0,8767	MANDIRI
87	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180419	AIR HITAM	1804192007	SINAR JAYA	0,8571	0,5667	1	0,8079	MAJU
88	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180419	AIR HITAM	1804192008	RIGIS JAYA	0,7314	0,5667	1	0,766	MAJU
89	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180419	AIR HITAM	1804192009	SUKA DAMAI	0,7829	0,6167	1	0,7998	MAJU
90	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180419	AIR HITAM	1804192010	MANGGARAI	0,7086	0,6833	1	0,7973	MAJU
91	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180420	PAGAR DEWA	1804202001	PAHAYU JAYA	0,8629	0,8	0,8667	0,8432	MANDIRI
92	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180420	PAGAR DEWA	1804202002	BASUNGAN	0,8571	0,7333	0,9333	0,8413	MANDIRI
93	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180420	PAGAR DEWA	1804202003	MEKAR SARI	0,8457	0,6167	1	0,8208	MANDIRI
94	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180420	PAGAR DEWA	1804202004	SIDOMULYO	0,92	0,8833	1	0,9344	MANDIRI
95	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180420	PAGAR DEWA	1804202005	SIDODADI	0,8229	0,5	0,8	0,7076	MAJU
96	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180420	PAGAR DEWA	1804202006	MARGA JAYA	0,84	0,7	0,9333	0,8244	MANDIRI
97	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180420	PAGAR DEWA	1804202007	SUKA JAYA	0,8057	0,5167	0,8667	0,7297	MAJU
98	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180420	PAGAR DEWA	1804202008	BATU API	0,8457	0,5167	0,6	0,6541	BERKEMBANG
99	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180420	PAGAR DEWA	1804202009	PAGAR DEWA	0,8229	0,5833	0,8	0,7354	MAJU
100	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180420	PAGAR DEWA	1804202010	SUKA MULYA	0,7257	0,55	0,9333	0,7363	MAJU
101	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180421	BATU KETULIS	1804212001	ARGOMULYO	0,8457	0,7333	0,9333	0,8375	MANDIRI

102	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180421	BATU KETULIS	1804212002	BATU KEBAYAN	0,9029	0,8333	0,8	0,8454	MANDIRI
103	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180421	BATU KETULIS	1804212003	ATAR BAWANG	0,8114	0,55	0,9333	0,7649	MAJU
104	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180421	BATU KETULIS	1804212004	CAMPANG TIGA	0,8057	0,5667	0,8667	0,7463	MAJU
105	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180421	BATU KETULIS	1804212005	LUAS	0,9314	0,5833	0,8	0,7716	MAJU
106	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180421	BATU KETULIS	1804212006	BAKHU	0,8	0,7167	0,8667	0,7944	MAJU
107	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180421	BATU KETULIS	1804212007	WAY NGISON	0,8171	0,8	0,8	0,8057	MAJU
108	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180421	BATU KETULIS	1804212008	KUBU LIKU JAYA	0,8343	0,65	0,6667	0,717	MAJU
109	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180421	BATU KETULIS	1804212009	SUMBER REJO	0,76	0,6	0,8667	0,7422	MAJU
110	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180421	BATU KETULIS	1804212010	ATAR KUWAU	0,8686	0,4667	0,6667	0,6673	BERKEMBANG
111	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180422	LUMBOK SEMINUNG	1804222001	LOMBOK	0,84	0,6833	0,9333	0,8189	MANDIRI
112	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180422	LUMBOK SEMINUNG	1804222002	HENI ARONG	0,8	0,6	0,8667	0,7556	MAJU
113	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180422	LUMBOK SEMINUNG	1804222003	SUKA BANJAR	0,84	0,8	0,9333	0,8578	MANDIRI
114	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180422	LUMBOK SEMINUNG	1804222004	LOMBOK TIMUR	0,8057	0,6	0,8667	0,7575	MAJU
115	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180422	LUMBOK SEMINUNG	1804222005	SUKA BANJAR II UJUNG REMBUN	0,7143	0,5333	0,8667	0,7048	BERKEMBANG
116	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180422	LUMBOK SEMINUNG	1804222006	SUKA MAJU	0,8286	0,6333	1	0,8206	MANDIRI
117	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180422	LUMBOK SEMINUNG	1804222007	UJUNG	0,7943	0,6167	0,8667	0,7592	MAJU
118	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180422	LUMBOK SEMINUNG	1804222008	KEAGUNGAN	0,8286	0,7167	1	0,8484	MANDIRI
119	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180422	LUMBOK SEMINUNG	1804222009	TAWAN SUKA MULYA	0,7543	0,6167	0,9333	0,7681	MAJU
120	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180422	LUMBOK SEMINUNG	1804222010	PANCUR MAS	0,7486	0,5	0,8667	0,7051	BERKEMBANG
121	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180422	LUMBOK SEMINUNG	1804222011	LOMBOK SELATAN	0,7657	0,5833	0,9333	0,7608	MAJU
122	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180423	BANDAR NEGERI SUOH	1804232001	SUOH	0,8629	0,8333	0,8667	0,8543	MANDIRI

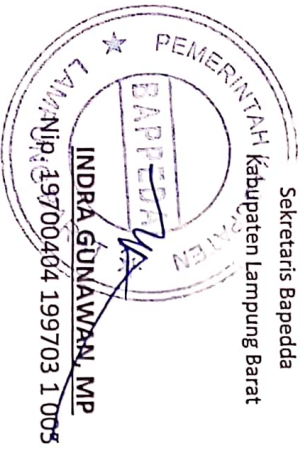


123	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180423	BANDAR NEGERI SUOH	1804232002	SRIMULYO	0,8857	0,7	0,9333	0,3397	MANDIRI
124	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180423	BANDAR NEGERI SUOH	1804232003	BANDAR AGUNG	0,8571	0,5833	0,8	0,7468	MAJU
125	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180423	BANDAR NEGERI SUOH	1804232004	RINGIN JAYA	0,8914	0,6667	0,8667	0,8083	MAJU
126	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180423	BANDAR NEGERI SUOH	1804232005	BUMI HANTATAI	0,8743	0,5667	0,8667	0,7692	MAJU
127	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180423	BANDAR NEGERI SUOH	1804232006	GUNUNG RATU	0,8686	0,7	0,9333	0,834	MANDIRI
128	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180423	BANDAR NEGERI SUOH	1804232007	TANJUNG SARI	0,9314	0,9167	0,6	0,816	MANDIRI
129	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180423	BANDAR NEGERI SUOH	1804232008	NEGERI JAYA	0,8686	0,6833	0,8667	0,8062	MAJU
130	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180423	BANDAR NEGERI SUOH	1804232009	TEMBELANG	0,9257	0,8	0,8667	0,8641	MANDIRI
131	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180423	BANDAR NEGERI SUOH	1804232010	TRI MEKAR JAYA	0,8114	0,9	0,8667	0,8594	MANDIRI

Di Sahkan Team Verifikasi

a.n. Kepala Bappeda

Sekretaris Bappeda  
Kabupaten Lampung Barat



**INDRA GUNAWAN, M.P.**  
NIP. 19700404 199703 1 005

Kepala DPMPT  
Kabupaten Lampung Barat

**Drs. SYAEKHUDDIN, M.M.**  
NIP. 19680913 198909 1 002



**TASWIN PARIZULLAH, S.Hi**  
Koordinator Kabupaten

## LAMPIRAN



Monitoring dan Evaluasi Dana Desa dan ADP Tahun 2024



Evaluasi dan Monitoring Dana Desa dan ADP Tahun 2024







Rapat Evaluasi Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024



Rapat Evaluasi Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024







Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2024